

346.073
yul
p a

**PERTANGGUNGJAWABAN PERUM PEGADAIAN
TERHADAP BARANG YANG DIGADAIKAN
DI KOTA SEMARANG**



TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Strata 2

MAGISTER KENOTARIATAN

oleh :

**RR. Dewi Puspa Yulawati, A.Md, SH
B4B002148**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

2004

ABSTRAKSI

PERTANGGUNGJAWABAN PERUM PEGADAIAN TERHADAP BARANG YANG DIGADAIKAN DI KOTA SEMARANG

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan Bank yang memberikan pinjaman uang / kredit kepada para nasabah yang didasarkan pada hukum gadai yaitu didahului dengan adanya perjanjian kredit antara kreditur dan debitur dalam hal pinjam meminjam uang yang kemudian diikuti dengan penyerahan benda bergerak sebagai jaminan pelunasan hutangnya.

Di dalam KUH Perdata, masalah gadai diatas diatur di dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160, dalam perjanjian gadai ini barang yang digadaikan harus keluar dari tangan pemberi gadai dan berada dalam penguasaan pemegang gadai (inbezitstelling), hal ini merupakan syarat mutlak untuk dapat terjadinya gadai,

Dalam praktek gadai di PERUM Pegadaian, pihak pegadaian menerima seluruh barang bergerak kecuali yang tidak diatur dalam pasal 6 Aturan Dasar Pegadaian (ADP), setiap nasabah yang memberikan barang jaminan untuk digadaikan dianggap sebagai pemilik barang. Hal itu merupakan dasar penerimaan barang gadai yang oleh PERUM Pegadaian mengacu pada pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata, tetapi di dalam kenyataannya ada kasus yang terjadi bahwa barang yang digadaikan bukan merupakan barang milik nasabah sendiri, melainkan barang yang didapatkan dari hasil pencurian dan pinjam meminjam. Dalam kasus tersebut pihak pegadaian dan pemilik barang yang sebenarnya merasa dirugikan, pada kasus pencurian, pemilik barang yang sesungguhnya (eigenaar) mempunyai hak untuk menuntut kembali barangnya selama jangka waktu 3 tahun didasarkan pada pasal 1977 ayat (2) KUHPerdata, sehingga jika ada kasus pencurian barang yang kemudian barang tersebut digadaikan, maka yang dilindungi adalah pemilik barang yang sebenarnya dan mengenai barang pinjaman yang digadaikan yang mendapatkan perlindungan hukum adalah pihak pegadaian yang didasarkan pada pasal 1152 ayat (4) dan pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata.

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft...	3245/TI.m.mot / e1
Tgl.	14 Feb '05

ABSTRACT

RESPONSIBILITY OF PAWNSHOP OF SEMARANG FOR PAWNING OBJECT

Pawnshop is one of non bank finance institution which credit of money for people based on pawn law which is precended by contract between creditor and debtor in the case of saving and lending money then followed by hands over unstationary object as guarantee for paying off his debt.

Pawn matter has been regulated article 1150 until 1160 in KUH Perdata, within pawn contract, the pawner had to pawn the object on himself and the pawn broker has the right to contract over the pawned object. These are an unconditional guarantee for executing a valid pawn (inbezitstelling).

In practice, pawnshop can accept all kinds of unstationary object except beyond the article 6 Aturan Dasar Pegadaian (ADP), each people who is giving guarantee object for pawnshop in considered as the object's owner. That is the principle of accepting pawn object by pawnshop which is refer to article 1977 (1) KUH Perdata, however some cases happen where the pawned object is not being ownerred by himself, but it take from stealing and borrowing. In that case, actually the object's owner (eigenaar) has the right to get the object back within 3 years article 1977 (2) KUH Perdata, so that if any stealing cases of the steal object pawned, the real owner is going to be main party protected and for the crime object pawned, pawnshop is to be the party protected based on article 1150 (4) and 1977 (1) Civil Law Regulation.

**PERTANGGUNGJAWABAN PERUM PEGADAIAN
TERHADAP BARANG YANG DIGADAIKAN
DI KOTA SEMARANG**

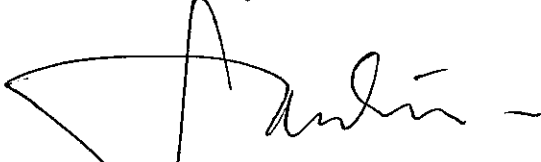
Disusun oleh :

**RR. Dewi Puspa Yuliawati, A.Md, SH
B4B002148**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 28 September 2004
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

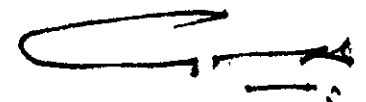
**Menyetujui,
Komisis Pembimbing**

Pembimbing Utama



(H.A. Tulus Sartono, SH, MH)

Mengesahkan



(Prof. IGN. Sugangga, SH)

MOTTO

- Mana saja orang yang diberi ilmu oleh Allah kemudian menyimpannya, maka besok di hari kiamat Allah akan mengekangnya dengan kekangan api neraka. (Hadist Riwayat A. Thabaroni)
- Orang – orang yang paling dicintai Allah ialah orang yang mudah bila menjual, mudah bila membeli, mudah bila membayar dan mudah bila menagih hutang. (Hadist Riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah)

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- Ilmu Pengetahuan dan Almamaterku Universitas Diponegoro Semarang
- Ayah Ibuku tercinta
- Kakak – kakakku tersayang
- Sahabat dan teman – temanku yang telah banyak membantu & menolong dalam menyelesaikan studi, yang tidak dapat disebutkan satu persatu

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di lembaga pendidikan lainnya, pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang September 2004

Penulis

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pertanggungjawaban Perum Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan Di Kota Semarang”.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Magister Notariat Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penyusunan tesis ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Maka perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan serta petunjuk – petunjuk yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini, kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budiardjo, M.Sc, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Bapak Prof. Dr. Soeharyo Hadisaputro, dr. SP.PD (K) selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang
3. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH selaku Ketua Program Magister Notariat Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak R. Suharto, SH.M.Hum selaku Sekretaris Program Magister Notariat Universitas Diponegoro Semarang.

5. Bapak H.A. Tulus Sartono,SH,MH selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis
6. Bapak H. Kashadi, SH selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan serta perhatiannya selama penulis menuntut ilmu di Program Magister Notariat Universitas Diponegoro Semarang.
7. Bapak Eddy Warnoto, SH selaku Kepala Cabang Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang
8. Bapak Arie Setiawan, SH, MBA selaku Pemimpin Wilayah PERUM Pegadaian kantor wilayah Semarang
9. Bapak dan Ibu tercinta, serta kakak – kakakku yang telah memberikan dorongan baik moral maupun material serta limpahan kasih sayangnya kepada penulis.
10. Teman – teman dan semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata semoga tesis ini dapat berguna bagi semua pihak.

Semarang, September 2004

Penyusun

(Rr. Dewi Puspa Yuliawati, A.Md, SH)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 12
A. Sejarah dan Pengertian Gadai	12
B. Obyek dan Subyek Gadai	18
C. Proses Terjadinya Gadai	21
D. Hak Dan Kewajiban Pemberi Dan Pemegang Gadai	26
E. Berakhirnya Gadai	34
F. Pelaksanaan Lelang Benda Gadai.....	38

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Metode Pendekatan	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Spesifikasi Penelitian	41
D. Teknik Sampling	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Analisa Data	44
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 45
A. Praktek Gadai Dan Praktek Lelang Di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang	46
B. Bagaimana Jika Obyek Gadai Merupakan Benda Curian, Pinjaman	81
C. Bagaimana Jika Barang Gadai Rusak.	91
 BAB V PENUTUP	 99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran – saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak terlepas dari masyarakat itu sendiri. Demikian juga dalam bidang usaha, bidang ini selalu menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Salah satu bidang usaha yang terdapat di Indonesia adalah Perum Pegadaian yang merupakan lembaga pembiayaan bukan Bank yang melakukan jasa pemberian pinjaman uang / kredit kepada masyarakat, dengan cara menguasai benda / barang yang digadaikan oleh para nasabah dan setelah dilakukan penafsiran harga terhadap barang atau benda tersebut maka para nasabah dapat langsung menerima pinjaman uang dari barang atau benda yang digadaikan tersebut. Penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat tersebut didasarkan pada hukum gadai, dan apabila pada waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo) pinjaman yang diperoleh tidak dikembalikan maka barang jaminan tersebut dapat dijual lelang guna menutup pengembalian pinjaman dan jika masih ada nilai sisanya maka akan dikembalikan kepada peminjam.¹

Peranan Perum Pegadaian di dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat sekarang ini dituangkan di dalam SK Menteri Keuangan No. KEP -- 39/ MK/6 / 1 /1971 Bab II Pasal 2 yaitu :

¹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murtati, Segi Hukum Lembaga Pembiayaan dan Keuangan, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, halaman 110

1. Membina perekonomian rakyat dengan menyalurkan kredit atas dasar gadai kepada :
 - a. Para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif,
 - b. Kaum buruh, pegawai negeri yang ekonominya lemah yang bersifat konsumtif
2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap dan praktek – praktek riba lainnya.
3. Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha – usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat.
4. Membina pola perkreditan supaya benar – benar terarah dan bermanfaat terutama mengenai kredit yang bersifat produktif dan bila perlu memperluas operasinya.²

Berdasarkan SK Menteri Keuangan No. KEP – 39/ MK/ 6 / 1 /1971 maka tugas pokoknya menjadi ganda yaitu disamping peranannya untuk mencegah adanya praktek riba, juga mengarah pada pinjaman yang produktif, sesuai dengan usaha Pemerintah dalam pembangunan.

Prosedur pemberian pinjaman uang di Perum Pegadaian adalah sangat mudah tidak berbelit – belit dan memerlukan waktu yang relatif cepat dibandingkan dengan Bank, tetapi dalam hal ini terdapat syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur atau nasabah, baik syarat formil maupun syarat materiil demi terlaksananya perjanjian gadai.

Syarat formil yang harus dipenuhi calon nasabah untuk dapat mengambil pinjaman uang di Perum Pegadaian yaitu dengan suatu perjanjian tertulis antara nasabah dengan Perum Pegadaian yang

² SK Menteri Keuangan No. KEP.39/MK/6/I/1971 Bab II Pasal 2

dituangkan dalam sebuah formulir yang disebut dengan Surat Bukti Kredit (SBK). Surat Bukti Kredit ini dikeluarkan oleh Perum Pegadaian dengan seijin Kepala Cabang, karena merupakan surat berharga.

Surat Bukti Kredit ini dikeluarkan jika ada nasabah yang akan meminjam uang dengan cara gadai pada Perum Pegadaian, yang kemudian surat tersebut diisi oleh petugas setelah petugas menyerahkan barang jaminan dan diperiksa untuk ditaksir. Dalam hal ini nasabah harus datang sendiri ke kantor cabang Pegadaian dengan membawa benda bergerak sebagai jaminan gadai dalam meminjam uang. Setelah itu nasabah harus mengisi formulir lain yang disebut dengan formulir Permohonan Pinjaman yang disediakan oleh pihak Perum Pegadaian dan formulir pinjaman ini harus diisi sendiri oleh nasabah yang akan meminjam uang. Isi formulir tersebut sebagai data nasabah yaitu identitas nasabah yang jelas sesuai dengan aturan dasar pegadaian atau Reglement Pegadaian Pasal 11 No. 4 yang mengatakan :

” Pada saat gadai harus tertulis sedikitnya nama pegadai, nomor urut yang sama dengan nomor urut dalam buku gadai, bangsa pegadai dan keterangan yang jelas tentang orang ini, keterangan barang yang akan digadaikan, nilai dan uang pinjaman tentang tiap barang gadai sendiri – sendiri, hari saat digadaikan, tarif uang bunga dan tempo yang terlama untuk menghitung bunga dan tentang saat barang itu boleh dilelangkan. “³

³ Reglement Pegadaian Pasal 11 No. 4

Sedangkan syarat -- syarat materiil yang harus dipenuhi oleh calon debitur atau nasabah agar barang jaminan dapat diterima oleh Perum Pegadaian barang tersebut harus berupa barang bergerak yang dapat digadaikan dan tidak dilarang oleh hukum yang berlaku dan barang tersebut mempunyai nilai dan harga dipasaran. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka barang jaminan tersebut tidak dapat digadaikan dan perjanjian gadai tidak dapat dilaksanakan oleh Perum Pegadaian, tetapi dalam penerimaan barang gadai yang dijadikan jaminan gadai, pihak Perum Pegadaian tidak hanya didasarkan peraturan -- peraturan saja, tetapi digunakan juga rasa sosial dan manusiawi sehingga akan sesuai dengan tujuannya yaitu membantu masyarakat dalam hal keuangan dengan cara gadai khususnya untuk masyarakat golongan ekonomi lemah.

Unsur terpenting dari hak gadai ialah bahwa benda yang dijaminakan harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Namun penguasaan benda oleh pemegang gadai bukan untuk menikmati, memakai dan memungut hasil, melainkan hanya untuk menjadi jaminan pembayaran hutang pemberi gadai kepada pemegang gadai.

Gadai merupakan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan yang mempunyai sifat -- sifat kebendaan pada umumnya yaitu senantiasa melekat atau mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan akan tetap ada meskipun mungkin milik benda itu kemudian jatuh ke tangan orang lain, sehingga jika seorang pemilik benda kehilangan benda itu, maka ia berhak meminta kembali benda itu dari tangan siapapun benda itu

berada.⁴ Dalam KUH Perdata eigendom merupakan hak kebendaan yang paling sempurna. Khusus mengenai bezit terhadap benda bergerak, berlaku asas yang tercantum pada Pasal 1977 (1) KUH Perdata yang menyatakan “ terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya”. Bezit atas benda bergerak tidak atas nama adalah legitimasi bagi yang berhak⁵ Jadi bezit bukan eigendom, tetapi bagi siapa yang dengan itikad baik menduga bezitter sebagai eigenaar, adalah “ safe “ (aman).

Dalam masalah barang jaminan merupakan barang pinjaman gadai berdasarkan Pasal 1977 (1) KUH Perdata yang pada dasarnya mengatakan, bahwa seseorang yang memegang (menguasai) barang bergerak dianggap sebagai pemilik dari barang tersebut dan bila barang itu merupakan pinjaman dari orang lain maka orang yang bersangkutan dapat meminta surat persetujuan gadai dari si pemilik barang atau si pemilik barang menguasai barang miliknya untuk digadaikan.

Dari perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak debitur dan kreditur di atas, menurut penulis adalah sah walaupun si debitur bukanlah orang yang berwenang atas barang tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1152 ayat (4) yang menyatakan :

” Hal tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barangnya gadai tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada si berpiutang yang telah menerima barang tersebut dalam

⁴ Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata, Alumni Bandung, 1985, halaman 155

gadai dengan tidak mengurangi hak si yang kehilangan atau kecurian barang itu.”

Jika barang rusak pemberian ganti rugi oleh pihak PERUM pegadaian terhadap barang jaminan gadai yang rusak / hilang akibat kelalaiannya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 1157 ayat (1) dimana disebutkan si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotannya barang gadai, sekadar itu telah terjadi karena kelalaiannya.

B. Perumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian dan melihat kenyataan – kenyataan yang ada dalam praktek maka tentunya banyak permasalahan yang dapat dibahas. Agar masalah – masalah yang diteliti tidak menyimpang dari tujuan semula, maka perlu diadakan pembatasan – pembatasan atas masalah yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam membahas dan menguraikan permasalahan – permasalahan yang timbul sehingga dengan demikian, penulis hanya akan membatasi masalah pertanggungjawaban Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Depok Semarang terhadap barang yang digadaikan dan permasalahan – permasalahannya yang timbul di dalamnya dimana Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang mewakili Perum Pegadaian di kota Semarang karena pada prinsipnya pelaksanaan dan kinerja Perum Pegadaian seluruh kota Semarang adalah sama.

⁵ Purwahid Patrik, Hukum Benda, (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

Dengan didirikannya Perusahaan Umum Pegadaian adalah dengan maksud menghindarkan masyarakat (terutama masyarakat yang tingkat ekonominya lemah) dari para pelepas uang (kreditur) yang menetapkan pinjaman dengan bunga yang tinggi dan syarat – syarat yang memberatkan.

Dengan memperhatikan alasan pemilihan judul dan pembatasan masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek gadai dan lelang Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang.
2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak Perum Pegadaian jika obyek gadai merupakan benda curian, pinjaman.
3. Bagaimana pertanggungjawaban pihak Perum Pegadaian jika barang gadai rusak.

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan tesis tentu mempunyai tujuan positif bagi peneliti, demikian halnya penulisan ini dibuat dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktek gadai dan lelang Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang.

2. Untuk mengetahui tindak lanjut yang dilakukan Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang jika obyek gadai merupakan benda curian, pinjaman.
3. Untuk mengetahui tindak lanjut yang dilakukan Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang jika barang gadai rusak.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat untuk menambah pengetahuan bagi para pihak mengenai praktek gadai dan permasalahannya .
2. Secara teoritis, diharapkan juga hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kalangan akademis dalam mempelajari hukum yang berlaku di Perum Pegadaian.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini tersusun atas :

Bab I : Dalam bab ini penulis membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan yang diperoleh dalam penulisan tesis ini, dan sistematika penulisan.

Latar belakang berisi alasan penulis memilih penelitian tentang pertanggungjawaban Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang terhadap barang yang digadaikan.

Permasalahan berisi pertanyaan mengenai praktek gadai dan lelang pada Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang, tindak lanjut yang dilakukan Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang jika obyek gadai merupakan barang curian, milik orang lain, tindak lanjut yang dilakukan Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang jika barang gadai rusak .

Originalitas penelitian atau keaslian penelitian menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan penulis belum pernah dilakukan oleh penulis lainnya, sejauh pengamatan penulis.

Tujuan dan manfaat penelitian menguraikan mengenai tujuan dilakukannya penelitian serta manfaat penelitian secara praktis dan teoritis

Sistematika penulisan berisi uraian kerangka atau sistematika penulisan yang dibuat, yang terdiri dari 5 (lima) bab yaitu, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan dan penutup.

Bab II :tentang tinjauan pustaka, bab ini menguraikan tentang sejarah dan pengertian gadai, obyek dan subyek gadai, proses terjadinya gadai, hak dan kewajiban pemberi dan pemegang gadai, berakhirnya gadai serta praktek lelang benda gadai.

Bab III : berisi metode penelitian terdiri dari 10 (sepuluh) sub bab yaitu : metode pendekatan, lokasi penelitian, spesifikasi penelitian,

teknik sampling, responden, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data.

Lokasi penelitian adalah tempat obyek penelitian berada, yaitu di wilayah kota Semarang.

Jenis penelitian termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan serta gejala – gejala yang ada dengan maksud memperkuat teori lama dan menyusun teori baru.

Teknik sampling yang dipilih adalah secara non-random purposive sampling. Dengan kesempatan yang berbeda untuk setiap sample.

Responden yang dipilih untuk memperkuat data primer yang diambil langsung dari lokasi penelitian, dengan penentuan didasarkan kriteria – kriteria tertentu.

Jenis dan sumber data berisi uraian data yang digunakan dalam penelitian ini, serta sumber – sumbernya, pernyataan para responden, buku – buku, makalah, UU dan peraturan pemerintah.

Teknik mengumpulkan data berisi, teknik pengumpulan data dari sumber – sumber data, misalnya dengan menggunakan wawancara berstruktur dan studi kepustakaan.

Bab IV :Hasil penelitian dan pembahasan, merupakan hasil – hasil temuan penulis dalam studi lapangan selanjutnya akan penulis

analisis dengan dasar – dasar teori, guna menemukan jawaban- jawaban atas permasalahan yang ada.

Bab V :Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat hasil dari bab I sampai bab IV, sedangkan saran berisi pendapat penulis dari penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah dan Pengertian Gadai

Pada mulanya di Indonesia, gadai pada masa penjajahan Belanda berasal dari Bank Van Lening zaman Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC). Bank Van Lening itu didirikan dalam bentuk kerjasama dengan swasta Bank Van Lening ini mempunyai tugas antara lain memberikan pinjaman uang pada masyarakat dengan jaminan gadai. Hal ini terus berjalan hingga saat kekuasaan VOC dialihkan kepada pemerintah Hindia Belanda.¹

Pada zaman Raffles, Bank Van Lening ini dihapuskan dan hak untuk memberikan pinjaman uang dengan gadai sebagai jaminan, diserahkan secara bebas pada swasta, asal sudah memperoleh ijin untuk itu (licentiestelsel), kemudian licentiestelsel diganti dengan pachstelsel.

Ternyata pegadaian swasta ini sangat menekan masyarakat, sehingga timbul ide agar lembaga pegadaian berada ditangan pemerintah saja. Demikian untuk pertama kalinya pada tanggal 12 Maret 1901, S. 1901 No. 131 diadakan ketentuan tentang jawatan pegadaian (Pandhuisdienst), yang realisasinya berupa jawatan pegadaian di Sukabumi. Selanjutnya jawatan pegadaian tumbuh sebagai milik pemerintah, di Indonesia sesudah Sukabumi, jawatan pegadaian didirikan di kota lainnya.

Peraturan - peraturan jawatan pegadaian berturut - turut diadakan dalam S 1905 No 490 (Reglementen voor den pandhuisdienst), S 1928 No. 64 (Wijziging van voorschriften betreffende de pandhuisdienst), S 1928 No. 81 (Pandhuisreglement). Dengan berbagai perubahan mengenai struktur organisasi dan bunga dari kredit dengan jaminan gadai, ketentuan inilah yang dipakai secara materiil sebagai Aturan Dasar Pegadaian (ADP) hingga sekarang.

Mengenai organisasi jawatan pegadaian, menurut S 1930 No. 266, lembaga ini mendapat status sebagai jawatan. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah No. 178 tahun 1961 Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Negara. Berdasarkan Keppres No. 180 tahun 1965 pegadaian diintegrasikan dalam urusan Bank Sentral dan kemudian dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1969, Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Perusahaan Jawatan. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 103 tanggal 10 Nopember 2003 tentang pengalihan Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Umum. Pertimbangan dialihkannya bentuk perusahaan dari jawatan menjadi perusahaan umum pegadaian antara lain :²

1. Bahwa sesuai dengan perkembangan ekonomi dan moneter dewasa ini, dipandang perlu untuk lebih meningkatkan peranan lembaga kredit atas dasar hukum dasar yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

¹ R. Soenarso, Sejarah Pegadaian (Jakarta : Bina Karsa, 1971) hal. 43

² Ibid, hal 44

2. Bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan Perjanjian Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1969 dipandang perlu mengalihkan bentuknya menjadi Perum sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No. 9 Tahun 1969.

3. Bahwa pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Hak gadai diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150 - 1161 KUH Perdata. Pada Pasal 1150 yang dimaksud dengan gadai adalah :

” Suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang dan yang memberikan kewenangan pada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur - kreditur lainnya terkecuali biaya - biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya - biaya mana yang harus didahulukan. “

Dari bunyi definisi gadai yang ada dalam Pasal 1150 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata di dalamnya terdapat beberapa unsur - unsur, yaitu :³

1. Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai;

³ Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT. (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2002) Hal. 13

2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur;
3. Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak ;
4. Kreditur berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur - kreditur lainnya.

Ternyata dari definisi gadai belum terungkap semua sifat - sifat gadai. Untuk mengetahui sifat - sifat gadai dapat diketemukan dalam ketentuan - ketentuan lain dari KUH Perdata. Adapun sifat - sifat dari gadai adalah sebagai berikut :

1. Gadai adalah hak kebendaan

Dalam Pasal 1150 KUH Perdata tidak menyebutkan sifat ini, namun demikian sifat kebendaan ini dapat diketahui dari Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “ Pemegang gadai mempunyai hak revindikasi dari Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata, apabila barang gadai hilang atau dicuri”. Oleh karena hak gadai mengandung hak revindikasi maka hak gadai merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan ciri khas dari hak kebendaan.⁴

Hak kebendaan dari gadai ini bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti hak eigendom, hak bezit, hak pakai dan sebagainya. Memang benda gadai harus diserahkan kepada kreditur

⁴ Mariam Darus Badruzaman, Bab – Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia Alumni, (Bandung, 1978), hal.57

tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil penggantian dari benda tersebut guna membayar piutang.

2. Hak gadai bersifat accesoir

Hak gadai hanya merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya, yang berupa perjanjian pinjam uang. Sehingga boleh dikatakan bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila ia mempunyai piutang dan tidak mungkin seseorang dapat mempunyai hak gadai tanpa mempunyai piutang. Jadi hak gadai merupakan hak tambahan atau accesoir yang ada dan tidaknya bergantung dari ada tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Dengan demikian hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus.

Beralihnya piutang membawa serta beralihnya hak gadai, hak gadai berpindah pada orang lain bersama - sama dengan piutang yang dijamin dengan hak gadai tersebut, sehingga hak gadai tidak mempunyai kedudukan yang berdiri sendiri melainkan accesoir dengan perjanjian pokok.

3. Hak gadai tak dapat dibagi - bagi

Karena hak gadai tak dapat dibagi - bagi, maka dengan dibayarnya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap membebani benda gadai secara keseluruhan.

Menurut Pasal 1160 KUH Perdata disebutkan bahwa :
“ tidak dapatnya hak gadai dibagi - bagi dalam hal kreditur atau

debitur meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa ahli waris”.

Ketentuan ini tidak merupakan hukum yang memaksa, sehingga para pihak dapat menentukan sebaliknya atau dengan perkataan lain sifat tidak dapat dibagi - bagi dalam gadai ini dapat disimpangi apabila telah diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak.

4. Hak gadai adalah hak yang didahulukan

Hak gadai adalah hak yang didahulukan ini dapat diketahui dalam Pasal 1133 dan Pasal 1150 KUH Perdata, Karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan dari piutang - piutang yang lain, maka kreditur pemegang gadai mempunyai hak mendahului (*droit de preference*).

5. Benda yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh.

6. Hak gadai adalah hak jaminan yang kuat dan mudah pelaksanaannya.⁵

Menurut Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata menyatakan “bahwa hak gadai dan hipotik lebih diutamakan daripada privilege, kecuali jika undang - undang menentukan sebaliknya”. Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa hak gadai mempunyai kedudukan yang kuat.

Di samping itu kreditur pemegang gadai adalah termasuk kreditur separatis, selaku separatis pemegang gadai tidak terpengaruh oleh adanya kepailitan si debitur.

⁵ PJ. Soepratiknya, Pokok - Pokok Hukum Perdata Benda Jilid 2, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1983, hal. 54

Kemudian apabila debitur wanprestasi, pemegang gadai dapat dengan mudah menjual benda gadai tanpa memerlukan perantara hakim, asalkan penjualan benda gadai dilakukan di muka umum dengan lelang dan menurut kebiasaan setempat dan harus memberitahukan secara tertulis lebih dahulu akan maksud - maksud yang akan dilakukan oleh pemegang gadai apabila tidak ditebus (Pasal 1155 jo. Pasal 1156 ayat (2) KUH Perdata). Jadi disini secara penyitaan lewat juru sita dengan ketentuan - ketentuan menurut Hukum Acara Perdata tidak berlaku bagi gadai.

B. Obyek dan Subyek Gadai

1. Obyek Gadai

Obyek dari gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 jo Pasal 1152 ayat (1), Pasal 1152 bis, dan Pasal 1153 KUH Perdata. Dalam Pasal 1150 KUH Perdata disebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang / oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang - orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya - biaya mana harus didahulukan, sedangkan dalam

Pasal 1152 ayat (1) KUH perdata disebut tentang hak gadai atas benda - benda bergerak dan atas piutang - piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadai di bawah kekuasaan si berpiutang ataupun dibawah kekuasaan seorang pihak ketiga tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak, demikian juga dalam Pasal 1152 bis disebutkan bahwa untuk meletakkan hak gadai atas surat - surat tunjuk diperlukan endorsemen dan penyerahan suratnya. Penyebutan untuk surat - surat ini dapat menimbulkan kesan yang keliru mengenai obyek gadai. Yang menjadi obyek dgadai adalah piutang - piutang yang dibuktikan dengan surat itu.⁶

Di dalam Pasal 1153 KUH Perdata juga menyebutkan bahwa hak gadai atas benda - benda bergerak yang tidak bertubuh, kecuali surat - surat tunjuk / surat - surat bawa diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaiannya, orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini , tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang ijinnya si pemberi gadai dapat dimintanya suatu bukti tertulis.

Jadi kesimpulannya obyek gadai meliputi : benda bergerak bertubuh / berwujud, piutang atas bawa, piutang atas tunjuk, piutang atas nama.

2. Subyek Gadai

Subyek dalam gadai meliputi pemberi gadai yaitu pihak yang menggadaikan dan penerima atau pemegang gadai yaitu pihak yang

⁶ Purwahid Patrik dan Kashadi, *op. cit* halaman 17

menerima gadai. Untuk memahami subyek gadai, perlu diketahui lebih dahulu perjanjian yang tersangkut di dalamnya. Sebagaimana halnya dengan perjanjian - perjanjian jaminan pada umumnya, jika seseorang membuat suatu perjanjian jaminan maka sebenarnya di dalamnya terkandung dua jenis perjanjian. Pertama adalah perjanjian hutang - piutang (sebagai perjanjian pokok) dan kedua adalah perjanjian jaminan (yang bersifat aksesoir). Subyek dari masing - masing perjanjian tersebut ada dua, Dalam perjanjian pokok subyeknya adalah kreditur dan debitur, sedang dalam perjanjian jaminan subyeknya adalah pemberi jaminan dan pemegang jaminan. Kreditur adalah pihak yang memberi hutang (pihak berpiutang), sedang debitur adalah pihak yang berhutang. Pemberi jaminan adalah pihak yang menyediakan (memberikan) jaminan, dan pemegang jaminan adalah pihak yang menerima jaminan. Dalam hal masing - masing subyek dalam kedua perjanjian tersebut terpisah satu dengan yang lain, maka dalam perjanjian jaminan terdapat empat subyek. Jika debitur adalah pemberi jaminan dan kreditur adalah pemegang jaminan. Maka dalam dua jenis perjanjian tersebut hanya terdapat dua subyek. Kemungkinan lain adalah kreditur dan pemegang jaminan berada dalam satu tangan, sedang debitur dan pemberi jaminan terpisah (atau sebaliknya, dimana debitur dan pemberi jaminan terpisah sedang kreditur dan pemegang jaminan berada dalam satu tangan). Dalam keadaan demikian maka terdapat tiga subyek. Dalam hal gadai, pemberi gadai biasanya adalah debitur sendiri, namun dapat juga dilakukan oleh orang lain atas nama debitur. Jadi di

sini ada seseorang yang menggadaikan barang miliknya untuk hutang yang dibuat oleh debitur.⁷

Demikian juga pemegang gadai biasanya adalah kreditur sendiri yang dapat menuntut barang gadai yang dijaminkan padanya.

C. Proses Terjadinya Gadai

Untuk terjadinya gadai harus memenuhi persyaratan - persyaratan yang ditentukan dan menurut jenis benda yang digadaikan. Adapun cara - cara terjadinya gadai adalah sebagai berikut : ⁸

1. Cara terjadinya gadai pada benda bergerak bertubuh.

a. Perjanjian gadai

Dalam hal ini antara debitur dan kreditur mengadakan perjanjian pinjaman uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan atau perjanjian untuk memberikan hak gadai (perjanjian gadai).

Menurut Pasal 1151 KUH Perdata menyebutkan bahwa “ perjanjian gadai dapat dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian perjanjian pokok “. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian gadai tidak terikat dengan formalitas tertentu (bebas), sehingga dapat dibuat secara tertulis maupun lisan.

b. Penyerahan Benda Gadai

⁷ Ibid, halaman 16

⁸ Ibid, halaman 18 - 22

Menurut Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan, “ tidak ada hak gadai atas benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaannya si debitur ataupun yang kembali dalam kekuasaan debitur atas kemauan si kreditur “. Dengan demikian hak gadai terjadi dengan dibawanya barang gadai keluar dari kekuasaan si debitur pemberi gadai, syarat bahwa barang gadai harus dibawa keluar dari kekuasaannya si pemberi gadai ini merupakan syarat “ inbezitstelling “ yang merupakan syarat mutlak harus dipenuhi dalam gadai.

Barang dikatakan dibawa keluar dari kekuasaan pemberi gadai jika barang gadai diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai / kreditur atau pihak ketiga yang disetujui oleh kreditur.

2. Cara terjadinya gadai pada piutang atas bawa (aan toonder)

a. Perjanjian gadai

Antara debitur dan kreditur membuat perjanjian untuk memberikan hak gadai. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligator dan bentuknya bebas.

b. Penyerahan Surat Buktinya

Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa “ gadai surat atas bawa terjadi, dengan menyerahkan surat itu ke dalam tangan pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak “. Perlu diketahui bahwa piutang atas bawa selalu ada surat buktinya, surat bukti ini mewakili piutang. Surat (piutang) atas bawa adalah surat yang diperbuat debitur, dimana

diterangkan bahwa ia berhutang sejumlah uang tertentu kepada pemegang surat - surat mana diserahkannya ke dalam tangan pemegang. Pemegang berhak menagih pembayaran dari debitur, dengan mengembalikan surat atas bawa itu kepada debitur. Contoh gaji surat / piutang atas bawa misalnya sertifikat deposito. Sertifikat deposito menurut Bank Indonesia adalah bukti surat hutang yang dikeluarkan oleh bank atas sejumlah uang yang dipercayakan kepadanya untuk jangka waktu tertentu. Sertifikat deposito dikeluarkan atas bawa, dapat diperjual belikan sewaktu - waktu dan dapat dijaminkan untuk suatu kredit dari bank.

Bank Mandiri melakukan pengikatan gadai dengan menahan hasil sertifikat deposito yang dijaminkan sampai fasilitas kreditnya lunas. Dalam hal ini tidak diperlukan surat kuasa, namun untuk membuktikan bahwa bank menahan sertifikat deposito tersebut secara sah, maka nasabah harus menandatangani " Surat kuasa pencairan deposito. "⁹

Sedangkan contoh lain piutang atas bawa adalah obligasi, saham tidak atas nama.

3. Cara Terjadinya Gadai Pada Piutang Atas Tunjuk (aan order).

a. Perjanjian Gadai

Antara debitur dan kreditur membuat perjanjian gadai, yang bersifat konsensual, obligatoir dan bentuk bebas.

b. Adanya Endosemen Yang Diikuti Dengan penyerahan Suratnya.

⁹ Mariam Darus Badruzaman, Op.cit, halaman 97

Pasalnya 1152 bis KUH Perdata menyebutkan bahwa “ untuk mengadakan hak gadai piutang atas tunjuk diperlukan adanya endossemen pada surat hutangnya dan diserahkannya surat hutang pada pemegang gadai. “

Piutang atas tunjuk ini juga selalu ada surat buktinya, dimana surat bukti ini mewakili piutang. Endossemen adalah pernyataan penyerahan piutang yang ditandatangani kreditur (endosen) yang bertindak sebagai pemberi gadai dan harus memuat nama pemegang gadai (geendosserde). Bentuk gadai piutang atas tunjuk misalnya wesel. Wesel adalah surat yang mengandung perintah dari penerbit (trekker) kepada tersangkut (betrokken), untuk membayar sejumlah uang terhadap pemegang (houder), hak yang timbul dari wesel itu, oleh pemegang wesel dapat diletakkan sebagai jaminan kredit terhadap pemberi kredit.

4. Cara Terjadinya Gadai Pada Piutang Atas Nama (op naam)

a. Perjanjian Gadai

Antara debitur dan kreditur membuat perjanjian gadai, yang bersifat konsensual, obligatoir dan bentuknya bebas.

b. Adanya pemberitahuan kepada debitur dari piutang yang digadaikan

Pasal 1153 KUH Perdata menyebutkan bahwa “ hak gadai piutang atas nama diadakan dengan memberitahukan akan penggadaianya (perjanjian gadainya) kepada debitur “ yang dimaksud debitur di sini adalah debitur cessie. Dalam pemberitahuan ini debitur dapat

meminta bukti tertulis perihal penggadaianya dan persetujuan dari pemberi gadai. Setelah itu debitur hanya dapat membayar hutangnya kepada pemegang gadai. Bentuk pemberitahuan ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.

Pemberitahuan dengan perantaraan juru sita perlu diadakan apabila debitur tidak bersedia memberikan keterangan tertulis tentang persetujuan pemberian gadai itu.

Dalam gadai piutang atas nama tersangkut tiga pihak seperti pada penyerahan piutang atas nama (cessie). Gadai piutang atas nama juga dinamakan gadai cessie karena disini yang digadaikan adalah piutang atas nama, sedangkan penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan cessie.

Perbedaan antara cessie dengan gadai piutang atas nama adalah sebagai berikut :

1. Bentuk perjanjian

Cessie :

Harus dibuat dengan akta, baik dengan akta otentik maupun dengan kata di bawah tangan (Pasal 613 KUH Perdata).

Gadai piutang atas nama :

Bentuk perjanjiannya tidak terikat pada formalitas tertentu / bebas (Pasal 1151 KUH Perdata).

2. Pemberitahuan kepada debitur

Cessie :

UPT-PUSTAK-UNDIP

Dengan dibuatnya akta cessie maka perbuatan hukum adanya cessie itu sudah selesai dan pemberitahuan kepada debitur (cessus) hanya merupakan upaya agar mengikat, yaitu agar ia menjadi wajib membayar sah kepada cessionaries (pemegang gadai).

Gadai piutang atas nama :

Pemberitahuan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan supaya hak gadai terjadi. Setelah adanya pemberitahuan, debitur tidak lagi dapat membayar hutangnya kepada kreditur / pemberi gadai, melainkan kepada pemegang gadai

3. Cara pemberitahuan

Cessie :

Pemberitahuan kepada cessus hanya akan dilakukan dengan exploit jurusita/ betekening, apabila cessus tidak mau menerima dan tidak mau mengakui adanya cessie.

Gadai piutang atas nama :

Pemberitahuan dapat dilakukan secara bebas, dapat secara lisan atau tertulis.

D. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai serta Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai

Selama masih berlangsung hak gadai maka baik pemberi gadai (debitur) maupun pemegang gadai (kreditur) harus mengetahui hak dan kewajiban masing - masing. Ditetapkannya hak - hak dan

kewajiban - kewajiban di dalam suatu perjanjian dalam hal ini tentunya termasuk juga perjanjian gadai adalah bertujuan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Hak - hak dari pemegang gadai (kreditur) antara lain, adalah :

1. Hak untuk menjual barang gadai

Menurut Pasal 1154 ayat (1) KUH Perdata disebutkan bahwa apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain jika si berhutang atau si pemberi gadai ingkar janji (wanprestasi), maka si kreditur berhak menjual barang gadai dengan maksud untuk mengambil pelunasan piutang pokok, bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut. Walaupun pada si berpiutang oleh hukum diberikan hak menjual dengan kekuasaan sendiri (parate eksekusi), akan tetapi oleh hukum pun dalam soal gadai ini tidak menutup kemungkinan menjual benda gadai dengan perantaraan hakim.¹⁰

2. Hak untuk menahan barang gadai (hak retensi)

Pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan barang gadai sampai si debitur melunasi hutang pokok beserta bunga, ongkos dan biaya. Hal ini terjadi apabila debitur mempunyai hutang yang kedua setelah adanya pemberian gadai. Sebelum kedua hutang dibayar lunas oleh debitur walaupun pada hutang yang kedua tersebut tidak diperjanjikan dengan gadai, maka kreditur mempunyai hak untuk menahan barang gadai, hal itu

¹⁰ Ignatius Ridwan Widyadharma, Sedikit Tentang Hukum Jaminan di Indonesia, (Semarang : PT. Tanjung Mas 1982), halaman 23

sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Pasal 1159 ayat (2) KUH Perdata. Pasal 1159 ayat (2) KUH Perdata tersebut pada intinya mengatakan, bahwa si berpiutang tidaklah diwajibkan melepaskan barang gadai sebelum kepadanya dilunasi kedua hutang debitur.

3. Hak kompensasi

Hak ini erat hubungannya dengan hutang yang kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1159 ayat (2) Perdata. Apabila pada waktu debitur melunasi piutang pertama dan si kreditur telah mengeksekusi benda gadai, maka dari hasil pendapatan lelang pada gadai tersebut kreditur dapat mengambil lebih dahulu sejumlah uang yang sama banyaknya dengan piutang pertama yang dijamin dengan hak gadai. Kalau dari hasil lelang tersebut diserahkan oleh pemegang gadai kepada debitur (pemberi gadai, maka berarti kreditur mempunyai hutang kepada debitur). Menurut Pasal 1425 KUH Perdata hutangnya itu dapat dikompensasikan dengan piutang yang kedua.¹¹

4. Hak untuk mendapatkan ganti rugi

Pemegang gadai (kreditur) berhak meminta penggantian biaya dan ongkos yang diperlukan untuk pemeliharaan barang gadai kepada si pemberi gadai. Menurut Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata ditentukan bahwa yang harus diganti oleh debitur

¹¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op. cit.*, halaman 19

adalah biaya - biaya yang berguna dan perlu yang telah dikeluarkan guna keselamatan barang gadai.

5. Hak untuk menjual dalam kepailitan debitur

Menurut Pasal 56 ayat (1) Peraturan Kepailitan, dalam kepailitan debitur, kreditur pemegang gadai dapat melaksanakan hak - haknya, seolah - olah tidak ada kepailitan. Dengan demikian hak kreditur untuk melaksanakan parate eksekusi, tidak menjadi berkurang berhubung dengan adanya kepailitan debiturnya. Hanya saja hak untuk menjual barang gadai harus dilaksanakan dalam waktu dua bulan setelah debitur dinyatakan pailit, kecuali apabila tenggang waktu tersebut diperpanjang oleh hakim.¹²

6. Hak preferensi

Kreditur (pemegang gadai) mempunyai hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya dari pada kreditur - kreditur yang lain (Pasal 1133 jo Pasal 1150 KUH Perdata).

7. Hak untuk tetap menguasai benda gadai atas izin hakim

Pemegang gadai dapat menuntut agar barang gadai tetap berada di tangannya untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonis hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya (Pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata). Dengan demikian berarti

¹² P.J. Soepratignya, Op. cit, halaman 79

barang gadai dibeli oleh kreditur dengan harga yang pantas menurut pendapat dari hakim.¹³

8. Hak untuk menjual benda gadai dengan perantaraan hakim.

Penjualan benda gadai untuk mengambil pelunasan piutang dapat juga terjadi jika si berpiutang menuntut di muka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara – cara yang beserta bunga dan biaya. Hal seperti ini biasanya terjadi jika benda gadai berupa barang antik.

9. Selain kreditur (pemegang gadai) mempunyai hak untuk menagih piutang gadai, ia juga mempunyai hak untuk menerima bunga piutang gadai, ia juga mempunyai hak untuk menerima bunga piutang gadai. Hak ini dapat dilihat dalam Pasal 1158 KUH Perdata. Dimana ayat (1) dari pasal tersebut menyatakan, bahwa jika suatu piutang digadaikan sedangkan piutang itu menghasilkan bunga maka si kreditur berhak menerima bunga tersebut. Sedangkan di dalam ayat (2) dari Pasal 1158 KUHPerdata menyatakan, bahwa apabila piutang kreditur tidak menghasilkan bunga maka bunga yang diterima oleh si kreditur, harus dikurangkan dari uang pokok.

10. Dalam hal suatu piutang digadaikan maka si pemegang gadai mempunyai hak untuk menagih piutang gadai tersebut.¹⁴

¹³ Marhainis Abdulhay, Hukum Perdata Material Jilid II, (Jakarta : Pradnya Paramita 1983) halaman 175

¹⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda, (Jakarta ; Intermasa, 1981) halaman 155, halaman 159

Disamping mempunyai hak - hak yang telah disebutkan di atas pemegang gadai juga mempunyai kewajiban – kewajiban terhadap debitur, yaitu antara lain :

1. Kewajiban memberitahukan pemberi gadai, jika barang gadai dijual.

Dalam hal terjadi penjualan barang gadai, pemegang gadai diwajibkan untuk memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) selambat - lambatnya pada hari berikutnya (Pasal 1156 ayat (2) KUH Perdata).

2. Kewajiban memelihara barang gadai.

Kewajiban ini disimpulkan dari bunyi Pasal 1157 ayat (1) dan Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata. Dalam Pasal 1157 ayat (1) ditentukan bahwa “ Pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya”. Begitu juga pemegang gadai tidak boleh menyalahgunakan benda gadai (Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata).

3. Kewajiban untuk memberikan perhitungan dari hasil penjualan barang gadai dan besarnya piutang kepada pemberi gadai.

Apabila hasil penjualan melebihi piutang pokok, bunga dan biaya - biaya maka kreditur harus menyerahkan sisanya kepada pemberi gadai. Jika hasilnya kurang dibanding dengan besarnya seluruh piutang pokok, bunga dan biaya – biaya , maka kreditur masih mempunyai piutang pada debitur, bukan pada pemberi

gadai (bila pemberi gadai orang lain). Pemberi gadai harus bertanggungjawab sebesar harga barang gadai¹⁵

4. Kewajiban untuk mengembalikan barang gadai.

Kewajiban ini dapat diketahui dari ketentuan yang ada di dalam Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata, yaitu apabila kreditur menyalahgunakan barang gadai atau debitur telah melunasi sepenuhnya baik uang pokok, bunga dan biaya hutangnya serta biaya untuk menyelamatkan barang gadai, maka kreditur wajib untuk mengembalikan barang gadai kepada pemberi gadai.

5. Kewajiban untuk memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutangnya kepada debitur.

Bunga – bunga yang telah diterima kreditur dari debitur harus diperhitungkan dengan besar piutang dan atau bunganya.

6. Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam penagihan piutang gadai, pemegang gadai telah bertindak selaku kuasa dari pemberi gadai. Oleh sebab itu pemegang gadai akan menagih seluruh besarnya piutang gadai. Apabila hasil penagihan itu melebihi besarnya piutang pokok, bunga dan biaya, maka kreditur pemegang gadai harus menyerahkan sisanya kepada pemberi gadai. Jika ternyata hasil penagihan lebih kecil daripada

¹⁵ Purwahid Patrik dan Kashadi, Op. cit., halaman 22

jumlah seluruh piutang pemegang gadai , maka kreditur pemegang gadai masih mempunyai piutang terhadap debitur

Bukan hanya pemegang gadai saja yang mempunyai hak dan kewajiban, tetapi pemberi gadaipun mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Hak – hak yang dimiliki pemberi gadai (debitur) antara lain meliputi :

1. Pemberi gadai berhak untuk menuntut kembalinya barang gadai setelah hutang dan bunga ditambah biaya hutang dibayar lunas kepada si pemegang gadai atau apabila si kreditur (pemegang gadai) menyalahgunakan barang gadai.¹⁶
2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atas hilangnya atau rusaknya barang gadai akibat kesalahan si pemegang gadai. Misalnya A menggadaikan mobil kepada B tetapi oleh B mobil tersebut tidak dirawat dengan baik, sehingga harga atau nilai mobil si A tersebut menjadi turun (merosot). Atas turun atau merosotnya barang gadai tersebut, A selaku debitur dapat menuntut ganti rugi kepada B atas kelalaiannya itu.¹⁷
3. Pemberi gadai berhak menuntut kelebihan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemegang gadai.¹⁸

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Op. cit*, halaman 67

¹⁷ Elise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara – Perkara Perdata*, (Jakarta : Bina Kasara, 1987) halaman 161

¹⁸ Elise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin, *Ibid*, halaman 161

Pemberi gadai (debitur) juga mempunyai kewajiban – kewajiban yang harus dilaksanakannya, antara lain :

- a. Pemberi gadai diwajibkan mengganti segala biaya yang berguna dan perlu kepada si pemegang gadai atas segala upaya yang dilakukan oleh pemegang gadai untuk menyelamatkan barang gadai. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata.
- b. Demi keselamatan barang gadai dari bahaya bencana alam (force majeure), di dalam praktek sering pemberi gadai diwajibkan untuk mengansurakan barang gadai. Kewajiban ini memang efisien untuk gadai dalam jumlah besar.¹⁹
- c. Pemberi gadai berkewajiban membayar kekurangan pembayaran setelah barang gadai dijual tetapi tidak mencukupi jumlah hutangnya.²⁰

E. Berakhirnya Gadai

Secara khusus Undang – Undang tidak memberikan ketentuan mengenai hapusnya (berakhirnya) gadai. Namun demikian pada umumnya sudah diakui, bahwa gadai menjadi hapus dengan adanya hal – hal di bawah ini :

1. Hapusnya perikatan pokok

Hak gadai adalah hak aksesoir, maka dengan hapusnya perikatan pokok membawa serta hapusnya hak gadai.

¹⁹ P.J. Soepratignya, *Op. cit*, halaman 86

²⁰ R. Wijono Prodjodikoro, *Op. cit*, halaman 160

Secara umum apabila setelah jangka waktu atau sebelum jangka waktu tiba debitur mengambil atau menebus barang jaminan serta membayar uang pinjaman dan bunganya kepada kreditur, kemudian kreditur menyerahkan barang jaminan dan menerima uangnya kembali dari debitur, maka gadai / perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut menjadi berakhir / hapus.

2. Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai.

Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata menentukan bahwa : “ Hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan si pemegang gadai. “

Secara khusus Undang – Undang tidak memberikan keterangan mengenai berakhirnya gadai, tetapi dalam KUH Perdata Pasal 1152 (3) menyatakan bahwa hak gadai hapus apabila barang jaminan gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai atau kreditur . Maksudnya adalah jika debitur telah melunasi uang pinjaman dan bunganya maka kreditur harus menyerahkan kembali barang jaminan gadai tersebut kepada debitur sehingga barang jaminan tersebut telah keluar dari kekuasaan kreditur dan hak gadai menjadi hapus.

Namun demikian hak gadai tidak akan menjadi hapus apabila pemegang gadai kehilangan kekuasaan atas barang gadai tidak dengan sukarela (hilang atau dicuri). Jika ia memperoleh kembali barang gadai tersebut maka barang gadai dianggap tidak pernah hilang.²¹

²¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op. cit*, halaman 30

3. Karena musnahnya barang gadai.

Jika barang yang menjadi obyek perjanjian gadai musnah, tak lagi dapat dijamin, atau hilang, hingga sama sekali tidak dapat diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya. Jadi, tidak adanya obyek gadai mengakibatkan tidak adanya hak kebendaan yang sebelumnya membebani benda gadai, yaitu hak gadai.

4. Karena penyalahgunaan benda gadai

Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan “ Selama si pemegang tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai, maka si berutang tidaklah berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia telah membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya utangnya, yang untuk menjamin barang gadai telah diberikan, beserta pula segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai.”

Apabila kreditur menyalahgunakan benda gadai, pemberi gadai berhak menuntut pengembalian benda gadai. Dengan dituntutnya benda gadai tersebut maka hak gadai yang dipunyai pemegang gadai menjadi hapus demi hukum, namun hutangnya debitur tetap masih ada hanya sekarang tidak ada benda yang dijamin secara gadai.

5. Karena pelaksanaan eksekusi

Dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap benda gadai, maka benda gadai berpindah ke tangan orang lain. Oleh karena itu maka hak gadai menjadi hapus. Demikian pula apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian ternyata debitur tidak dapat melunasi utangnya, maka kreditur dengan sepengetahuan debitur akan menjual barang jaminan tersebut untuk melunasi utang debitur, sehingga dengan demikian gadai tersebut hapus. Hapusnya hak gadai tersebut karena kekuasaan kreditur sebagai pemegang gadai terhadap benda jaminan sebagai obyek gadai telah berpindah ke tangan orang lain dengan jalan penjualan.

6. Karena kreditur melepaskan benda gadai secara sukarela

Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan bahwa “ Tidak ada hak gadai apabila barang gadai kembali dalam kekuasaan pemberi gadai”. Hal demikian ini diartikan sebagai kreditur telah melepaskan haknya.

7. Percampuran

Apabila kedudukan sebagai orang yang berpiutang (kreditur) dan orang berhutang (debitur) berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dengan mana hutang piutang itu dihapuskan. Misalnya, si debitur dalam suatu testamen ditunjuk sebagai waris tunggal oleh krediturnya atau si debitur kawin dengan krediturnya

dalam suatu persatuan harta waris. Hapusnya hutang piutang dalam percampuran ini adalah betul - betul demi hukum dalam arti otomatis.²²

F. Pelaksanaan Lelang Benda Gadai

Apabila debitur wanprestasi yaitu tidak bisa melunasi hutang – hutangnya sampai dengan jatuh tempo, maka oleh Perum Pegadaian dilakukan pelelangan terhadap barang gadai yang dijaminkan.

Mengenai lelang atas barang gadai di Perum Pegadaian tersebut sebagaimana diatur dalam keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 82.A./UT/X/93, tentang perubahan dan tingkat sewa modal disebutkan antara lain²³ :

Lelang barang jaminan tetap dilakukan 2 (dua) kali sebulan, yang dilaksanakan pada sekitar tanggal 15 untuk kredit tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dan akhir bulan untuk kredit tanggal 16 sampai dengan akhir bulan.

Sebelum lelang dilaksanakan, barang – barang yang akan dilelang ditaksir dulu harganya. Penawar menyebut dengan suara jelas, untuk barang kain, sarung dan sebagainya, dibuka lipatnya dan barang lain diperlihatkan dengan betul kepada umum, cacat dan ciri barang harus diberitahukan pada waktu lelang untuk mencegah pengaduan di kemudian hari.

²² Subekti, *Op. cit.*, halaman 73

²³ Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 82/A/UT/X/93

Ada dua cara untuk menentukan patokan atau standar harga lelang, yaitu lelang terhadap barang gadai berupa logam mulia dipakai harga pasaran, lelang terhadap barang gadai berupa barang gudang seperti sepeda, sepeda motor, barang elektronik, tekstil dan barang – barang gudang lainnya, dalam penawarannya dipakai harga lelang minimal guna untuk melunasi hutang debitur.

Adapun hak – hak untuk melelang barang jaminan tersebut diatur dalam Pasal 1155 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa :

“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berpiutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, setelah dilakukan suatu peringatan untuk membayar, menyusun, menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan setempat serta atas syarat – syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.”

BAB III

METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian hukum, metodologi yang digunakan selalu berusaha menguraikan mengenai penalaran, dalil - dalil, postulat - postulat dan proposisi - proposisi yang akan menjadi latar belakang dari setiap langkah penelitian tersebut. Sehingga alternatif dan petunjuk - petunjuk yang diperoleh dapat digunakan sebagai pembandingan dari unsur - unsur penelitian yang sangat penting.¹

Dalam penulisan tesis ini, penulis mempergunakan beberapa metode yang biasanya digunakan dalam penelitian hukum untuk memperoleh bahan - bahan dan data yang diperlukan. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mendapatkan kebenaran yang obyektif dari permasalahan yang diteliti.

Adapun metode yang digunakan oleh dalam penelitian ini adalah :

A. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.² Pada penelitian ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, "Penelitian Hukum Normatif", Masalah - Masalah Hukum, (Nomor 5, 1988), halaman 13

² Ronny Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, halaman 34

penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.

Pendekatan ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek – aspek hukumnya, serta mencoba menjelajahi realitas empirik dalam masyarakat

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di wilayah Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang.

C. Spesifikasi Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini akan dipergunakan salah satu spesifikasi penelitian yaitu penelitian deskriptif analitis, maksud dari penelitian ini adalah untuk melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, obyek / suatu peristiwa mungkin tentang manusia, keadaan / gejala lainnya dan sekaligus berusaha mengambil kesimpulan umum dari masalah yang diteliti.

D. Populasi dan Teknik Sampling

Populasi adalah seluruh obyek / gejala / seluruh unit yang akan diteliti yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Perum Pegadaian di kota Semarang dan nasabah yang bermasalah. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas maka tidak mungkin

untuk diteliti seluruh populasi, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sample untuk memberi gambaran yang tepat dan benar.³

Pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non random sampling yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara memilih / mengambil subyek – subyek yang didasarkan pada tujuan – tujuan tertentu.⁴

Dikarenakan jumlahnya yang banyak sedangkan waktu penelitian yang dimiliki sangat terbatas, maka dalam penelitian ini sampelnya adalah Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang dimana Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang mewakili dari 14 unit cabang Perum Pegadaian di seluruh kota Semarang karena pada dasarnya pelaksanaan dan kinerja Perum Pegadaian seluruh kota Semarang adalah sama.

Responden dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Cabang Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang.
2. Kepala Humas Kantor Wilayah Daerah VI Perum Pegadaian Semarang
3. 2 (dua) orang nasabah pegadaian Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang yang obyek gadainya merupakan barang curian

³ Ibid halaman 36

⁴ Ibid halaman 36

4. 2 (dua) orang nasabah pegadaian Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang yang obyek gadainya merupakan barang milik orang lain.
5. 2 (dua) orang nasabah pegadaian Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang yang barang gadainya rusak.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan guna menjawab permasalahan diatas, disamping dipelajari berbagai literatur yang ada hubungannya dengan obyek penelitian, maka dilakukan pula penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder.

Oleh karena itu pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Penelitian lapangan (Field Research)

Untuk mencari data guna mendukung dan menunjang data sekunder yang telah diperoleh dari studi dokumen dan kepustakaan maka diperlukan studi lapangan ke instansi / lembaga terkait yang berhubungan dengan status benda / barang yang dijaminkan di Perum Pegadaian yang dilakukan dengan cara wawancara sebagai upaya untuk memperoleh informasi, alasan serta motifasi yang diwawancarai langsung

b. Studi Kepustakaan (Library Research).

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

F. Analisa Data

Yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.⁵

Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu tatacara penelitian yang menghasilkan data diskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶⁵

⁵ Ibid, halaman 116

⁶ Soerjono Soekanto, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1984 halaman 250

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian tentang gadai baik dari Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Depok Semarang maupun dari responden – responden yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Responden yang utama dalam penelitian ini adalah Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Depok Semarang dimana merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat izin resmi dari pemerintah untuk melakukan praktek gadai.

Untuk menunjukkan dan memperoleh kelengkapan data yang sudah didapatkan di Perusahaan Umum Pegadaian, penulis juga memperoleh data – data dari para pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan gadai di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Depok Semarang.

Dalam menguraikan bab ini, penulis akan membagi ke dalam tiga sub bab, yaitu :

- A. Praktek gadai dan lelang di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Depok Semarang dalam masyarakat.
- B. Bagaimana jika obyek gadai merupakan benda curian, pinjaman.
- C. Bagaimana jika barang gadai rusak

A. Praktek gadai dan lelang di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Depok Semarang.

1. Praktek Gadai Di PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang

Perum Pegadaian adalah satu – satunya lembaga Pemerintah yang bergerak di bidang jasa penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 103 tanggal 10 Nopember 2000 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian dan selaku salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan RI. Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian mempunyai misi utama yaitu :

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Pelaksanaan dari pegadaian dalam masa sekarang ini adalah menyalurkan kredit untuk kebutuhan konsumtif dan kredit untuk kebutuhan konsumtif dan kredit untuk kebutuhan produktif, terutama ditujukan untuk menggolong – golongkan ekonomi lemah dari jeratan para rentenir.

Tetapi dalam kenyataannya yang mencari pinjaman ke pegadaian tidak hanya masyarakat dari golongan ekonomi lemah saja, akan tetapi juga orang – orang yang sengaja untuk mencari kredit guna orang – orang yang sengaja untuk mencari kredit guna keperluan yang menghasilkan (produktif) untuk memperluas usahanya, misalnya para pengusaha kecil. Untuk membuktikan bahwa yang datang ke pegadaian tidak hanya dari golongan ekonomi lemah saja, bisa dilihat dari barang – barang yang dibawa oleh para nasabah ke pegadaian. Dulu sebelum Pelita I memang barang yang dibawa nasabah ke pegadaian kebanyakan berupa kain. Tetapi sekarang barang – barang tersebut sudah jarang didapatkan dan kebanyakan sudah berganti dengan barang – barang berupa perhiasan, elektronika, sepeda motor, bahkan peralatan komputer pun telah mulai ada. Di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Depok Semarang adalah barang – barang perhiasan / emas lantakan.¹

Pegadaian ternyata mempunyai pengertian atau batasan gadai sendiri. Pengertian gadai menurut pegadaian adalah memberikan kredit berupa uang dengan dasar jaminan barang bergerak dalam jangka waktu tertentu.²

Pada prinsipnya pelayanan kredit gadai di Perum Pegadaian berpedoman pada motto, Mudah, Murah, Cepat dan Aman. Perjanjian kredit gadai di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang dilakukan antara nasabah, sebagai debitur, pemberi gadai, dan Perum Pegadaian

¹ Eddy Warnoto, Wawancara, Kepala Cabang Pegadaian Depok Semarang (Semarang, 31 Maret 2004)

sebagai kreditur, pemegang gadai. Setiap nasabah yang datang ke Perum Pegadaian dengan membawa barang jaminan dianggap sebagai pemilik, Perum Pegadaian dalam memandang setiap nasabah yang datang dianggap mempunyai itikad yang baik, sehingga kepentingan dari nasabah tersebut harus dilindungi.³ Perjanjian kredit gadai dimulai setelah syarat – syaratnya dipenuhi oleh nasabah yang meliputi :

- Fotocopy KTP / Kartu Pengenal lain (SIM, Paspor)
- Barang Jaminan yang memenuhi persyaratan
- Surat Kuasa dari pemilik barang, jika dikuasakan
- Mengisi formulir permintaan kredit.
- Menandatangani perjanjian kredit (SBK)

Penggolongan – penggolongan pinjaman yang ditetapkan oleh pegadaian adalah sebagai berikut :

Penggolongan Nasabah berdasarkan besarnya kredit gadai

Tabel 1

Golongan	Uang Kredit Gadai (Rp.)	Sewa Modal Per 15 hari (%)	Jangka waktu Kredit Maksimal (Hari)
A	10.000 – 40.000	1.25	120
B	40.500 – 150.000	1.5	120
C	151.000 – 500.000	1.75	120
D	>510.000	1.75	120

Sumber data : Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang tahun 2004

1. Untuk golongan A besarnya uang pinjaman :

² Sunarso R, Buku Sejarah Pegadaian, (Jakarta, 1 Oktober 1971)

³ Eddy Warnoto, Wawancara, Kepala PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang (Semarang, 12 April 2004)

Rp. 10.000 s/ d Rp. 40.000 dengan tenggang waktu kredit 4 (empat) bulan.

2. Untuk golongan B besarnya uang pinjaman

Rp. 40.500 s/d Rp. 150.000 dengan tenggang waktu kredit 4 (empat) bulan

3. Untuk golongan C besarnya uang pinjaman :

Rp. 151.000 s/d Rp. 500.000 dengan tenggang waktu kredit 4 (empat) bulan.

4. Untuk golongan D besarnya uang pinjaman

Rp. 510.000 ke atas dengan tenggang waktu kredit 4 (empat) bulan.

Sedangkan penggolongan suku bunga didasarkan pada besarnya uang pinjaman (kredit) yang diberikan oleh pegadaian, adalah sebagai berikut :

- * Golongan A dikenakan bunga sebesar 1,25 % per 15 hari atau 2,5 % per 30 hari, dengan maksimum perhitungan jumlah hari bunga (pengenaan bunga) 180 hari, maksimum sewa modal 10 % dan barang akan dilelang pada bulan ke delapan apabila si pemilik tidak menebus barangnya.
- * Golongan B dikenakan bunga sebesar 1,5 % per 15 hari atau 3 % per 30 hari, dengan maksimum perhitungan jumlah hari bunga (pengenaan bunga) 90 hari, maksimum sewa modal 12 % dan barang akan dilelang pada bulan kelima apabila si pemilik tidak menebus barangnya.

- * Golongan C dan D dikenakan bunga sebesar 1,75 % per 15 hari atau 3,5 % per 30 hari, dengan maksimum perhitungan jumlah hari bunga (pengenaan bunga) 90 hari, maksimum sewa modal 14 % dan barang akan dilelang pada bulan kelima apabila si pemilik tidak menebus barangnya.

Besarnya uang pinjaman (UP) ditetapkan berdasarkan prosentase tertentu dari taksiran, prosentase tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Nomor 34 tahun 2003. Uang Pinjaman (UP) yang diberikan kepada nasabah ditentukan berdasarkan prosentase tertentu nilai taksiran. Adapun penetapan besarnya uang pinjaman masing – masing golongan adalah :

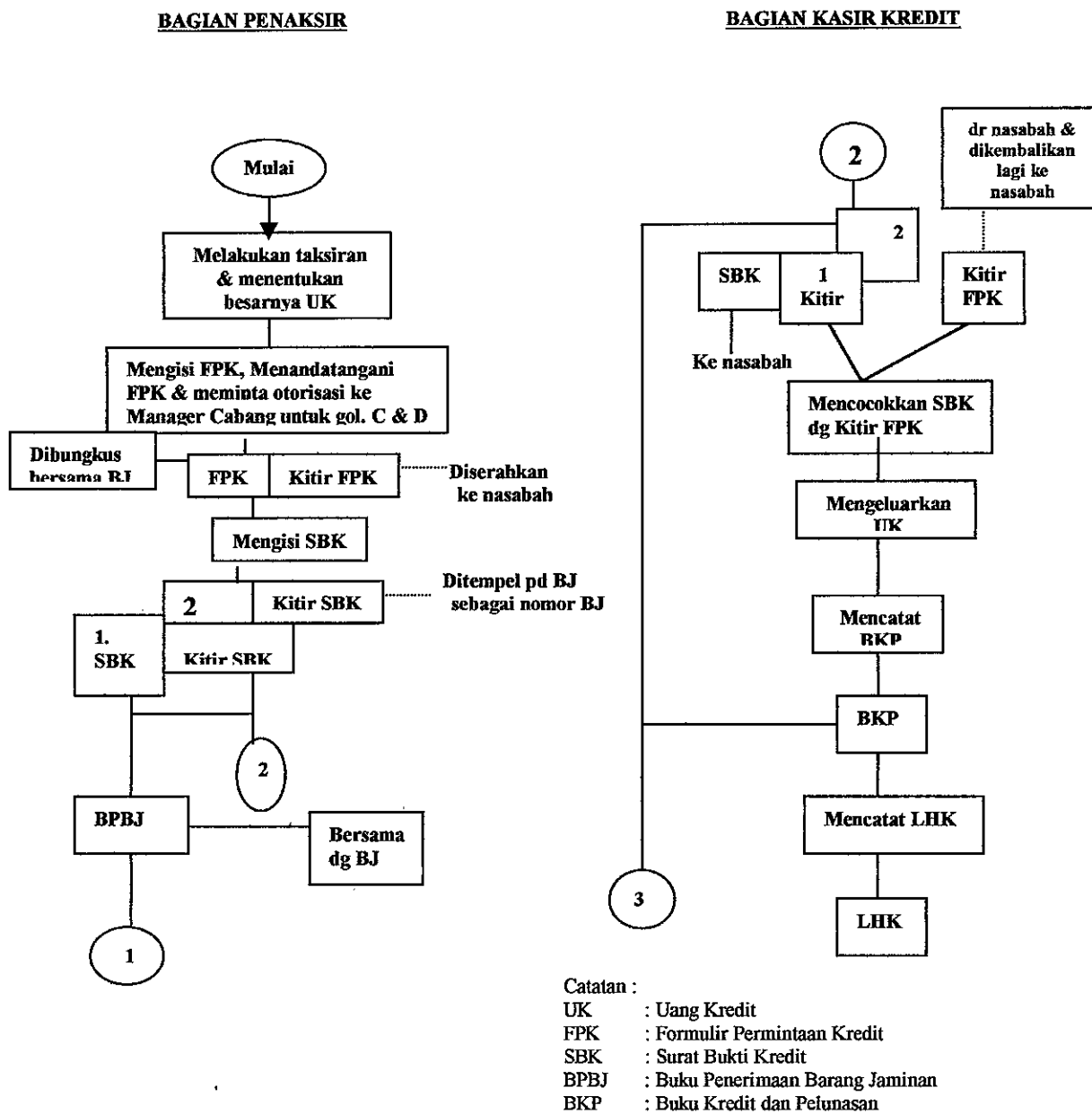
1. UP golongan A sebesar 91 % dari taksiran.
2. UP golongan B sebesar 89 % dari taksiran.
3. UP golongan C sebesar 88 % dari taksiran.
4. UP golongan D sebesar 88 % dari taksiran.

Besarnya prosentase uang pinjaman (UP) terhadap taksiran dan plafon pada masing – masing golongan, ditetapkan berdasarkan Surat Edaran No. 34 Tahun 2003 .⁴

Sistem pemberian kredit pada PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang menggunakan prosedur yang sangat mudah, tidak berbelit – belit dan memerlukan waktu yang relatif cepat. Berikut gambaran proses pemberian kredit di PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang :

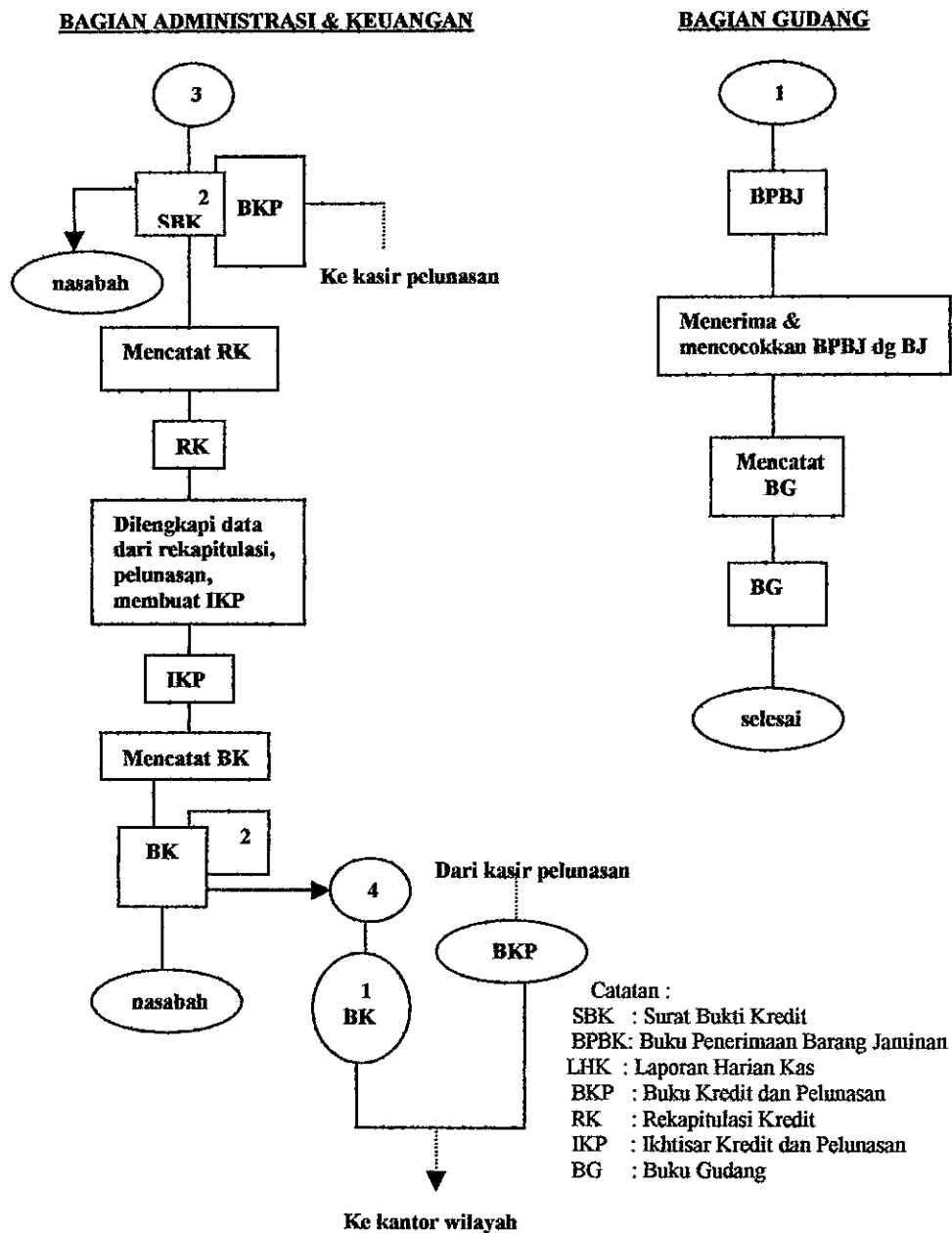
⁴ Eddy Warnoto, Wawancara, Kepala PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang (Semarang, 12 April 2004)

**Gambar 1 - PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT GADAI PADA
PERUM PEGADAIAN CABANG DEPOK SEMARANG**



Sumber : Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang

**Gambar 2 - PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT GADAI PADA
PERUM PEGADAIAN CABANG DEPOK SEMARANG
(LANJUTAN)**



Sumber : Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang

Prosedur memperoleh kredit pada pegadaian adalah sebagai berikut

a. Nasabah

1. Mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK).
2. Menyerahkan FPK yang telah diisi dengan melampirkan fotocopy / identitas lainnya serta barang jaminan yang akan dijaminkan.
3. Menerima kembali Kitir FPK sebagai tanda bukti penyerahan barang jaminan.
4. Menandatangani SBK asli dan dwilipat (lembar ke 2) yang diserahkan oleh kasir kredit.
5. Menerima sejumlah uang (UP) dan Surat Bukti Kredit (SBK) asli (lembar 1)
6. Menyerahkan Kitir FPK kepada kasir.

b. Penaksir

1. Menerima FPK dengan melampirkan KTP / identitas lainnya beserta barang jaminan dari nasabah
2. Memeriksa kelengkapan kebenaran pengisian FPK dan barang jaminan yng dijaminkan
3. Menandatangani FPK (pada bagian kitirnya) sebagai tanda bukti penerimaan barang jaminan dari nasabah.
4. Menyerahkan kitir FPK kepada nasabah.

5. Melakukan taksiran untuk menentukan nilai barang jaminan sesuai dengan Buku Peraturan Menaksir (BPM) dan Surat Edaran Nomor 34 tahun 2003.
6. Menentukan besarnya UP yang dapat diberikan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Mengisi (menulis) dan menandatangani SBK rangkap dua sesuai dengan kewenangannya.
8. Merobek kitir bagian dalam dan luar SBK dwilipat (lembar kedua). Kitir bagian luar untuk nomor barang jaminan dan kitir dalam digunakan sebagai arsip sementara.
9. Menyerahkan SBK asli dan badan SBK dwilipat (lembar ke 2) kepada kasir kredit.
10. Barang jaminan dimasukkan ke dalam kantong dan dibungkus atau dan ditemplei nomor barang ~ barang jaminan dan diplombir atau diikat.
11. Menjumlahkan potongan barang jaminan, taksiran dan UP, masing – masing golongan SBK berdasarkan data pada kitir dalam SBK dwilipat (lembar ke 2). Hasil penjumlahan tersebut ditulis pada buku Rekapitulasi Kredit dan Buku Serah Terima Barang Jaminan.
12. Menyerahkan barang jaminan yang telah diplombir atau diikat kepada bagian gudang dengan menggunakan Buku

Penyerahan Barang Jaminan dan membubuhkan tanda tangannya pada kolom “ penyerahan “.

13. Bersama – sama dengan petugas gudang menandatangani kolom serah terima barang jaminan pada Buku Penerimaan Barang Jaminan.

c. Kasir

1. Menerima SBK asli dan badan SBK dwilipat (lembar ke 2) dari penaksir
2. Mencocokkan SBK tersebut dengan kitir Formulir Permintaan Kredit yang diserahkan oleh nasabah.
3. Menyiapkan dan melakukan pembayaran uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SBK.
4. Membubuhkan paraf pada SBK asli dan dwilipat (lembar ke 2) pada kitir luar di belakang jumlah uang pinjaman.
5. Mengisi Buku Kredit berdasarkan SBK.
6. Membuat Laporan Harian Kas (LHK) berdasarkan Buku Kredit dan mencocokkannya dengan Buku Penerimaan Barang Jaminan yang dibuat Penaksir.
7. Menyerahkan badan SBK dwilipat (lembar ke 2), Laporan Harian Kas dan Kitir FPK kepada Petugas Tata Usaha.

d. Petugas Tata Usaha

1. Menerima badan SBK dwilipat (lembar ke 2), Laporan Harian Kas dari kasir.
2. Menyusun dan menyimpan badan SBK dwilipat (lembar ke 2).
3. Mencatat data nasabah pada buku nasabah dan setiap akhir bulan jumlah kredit yang diberikan dicatat pada Buku Statistik Perkembangan Usaha.
4. Melakukan pencatatan administrasi sesuai prosedur akuntansi kantor cabang.

e. Petugas Gudang

1. Menerima dan menghitung barang jaminan yang diserahkan oleh Penaksir serah terima barang jaminan menggunakan Buku Penerimaan Barang Jaminan.
2. Mencocokkan barang jaminan yang diterima dengan jumlah yang tertera pada Buku Penerimaan Barang Jaminan dan apabila terdapat cocok membubuhkan tanda tangan pada kolom “ penerimaan “
3. Melakukan pencatatan di Buku Gudang.⁵
4. Barang Jaminan yang diterima disimpan di gudang sesuai dengan golongan, rubrik, dan bulan kredit barang jaminan.

⁵ Surat Keputusan Direksi Nomor AK2/1/16 Lampiran III, Tentang Prosedur Akuntansi Kantor Cabang, 1993, halaman IIIC1.

Dari Ketentuan tersebut di atas dapatlah diketahui bahwa peranan penaksir itu sangatlah penting, karena secara umum menaksir itu adalah :

“ Menentukan nilai atau harga perkiraan tertentu dari suatu barang yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan kepada harga jadi atau harga pasar dan peraturan yang berlaku untuk masa tertentu. “⁶

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk dapat menaksir suatu barang yang akan dijadikan jaminan ada dua faktor pokok yang harus diketahui, yaitu :⁷

- a. Perkiraan harga jadi atau harga pasar dari barang yang bersangkutan.
- b. Peraturan atau ketentuan yang berlaku pada Perum Pegadaian dalam suatu masa, karena ini sering mengalami perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan harga.

Adapun yang dimaksud harga pasar adalah : “ Suatu harga yang terjadi setelah diadakan tawar menawar antara pembeli dan penjual atau harga yang terjadi setelah ada kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam arti yang wajar dan ditempat penjualan umum, seperti di pasar atau toko. “⁸

⁶ Buku Tata Pekerjaan Pegadaian, (Jakarta : Penerbit Kantor Pustaka Perum Pegadaian, 1991) halaman 1)

⁷ Eddy Warnoto, Wawancara, Kepala PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang (Semarang, 31 Maret 2004)

⁸ Buku Tata Pekerjaan Pegadaian, (Jakarta : Penerbit Kantor Pustaka Perum Pegadaian, 1991) halaman 1)

Begitu pentingnya taksiran sering dikatakan merupakan “ tulang punggungnya “ atau “ pangkal kegiatan “ dari maju mundurnya PERUM Pegadaian.

Kecuali mempunyai peran sebagai “ pangkal kegiatan “ taksiran juga sekaligus merupakan salah satu alat pengawasan.

Syarat – syarat yang harus diperhatikan oleh penaksir dalam menentukan taksiran, adalah :

- * Taksiran tidak boleh sama atau melebihi harga pasar.
- * Taksiran tidak boleh terlalu rendah dari harga pasar.

Perum Pegadaian menetapkan persenan keadaan barang yang akan dijadikan jaminan. Kalau keadaan barang masih baru = 100 %, hampir baru = 90%, masih baik = 80 %, cukup baik = 70 %.

Mengenai persenan keadaan barang ini dibatasi paling rendah (minimum) sampai 70 %, ini berarti bahwa barang – barang yang keadaannya kurang dari 70 % tidak dapat dijadikan barang jaminan. Hal ini untuk menghindari risiko yang mungkin timbul yang disebabkan karena akibat keadaan barang.

Setelah barang tersebut diputuskan bisa digunakan untuk jaminan, kemudian nasabah diberikan Surat Bukti Kredit (SBK) yang sesuai dengan golongan kredit untuk dibawa ke loket kasir. Di dalam Surat Bukti Kredit (SBK) tersebut antara lain disebutkan :

- a. Cap Cabang PERUM Pegadaian
- b. Nama dan alamat nasabah
- c. Jenis dan jumlah barang jaminan
- d. Jumlah pinjaman yang diminta
- e. Besarnya nilai barang jaminan
- f. Jangka waktu pinjaman dan bunga
- g. Jumlah uang pinjaman yang diberikan

Di loket kasir, Surat Bukti Kredit (SBK) yang sesuai dengan golongan kredit diserahkan kepada kasir untuk mendapatkan uang pinjaman atau kredit yang langsung dapat dibawa pulang oleh nasabah.

Tetapi untuk memperoleh kredit dari pegadaian ternyata tidak semua barang yang dibawa oleh nasabah dapat diterima sebagai barang jaminan oleh petugas pegadaian. Barang yang tidak boleh diterima sebagai barang jaminan sesuai dengan Aturan Dasar Pegadaian (ADP) Nomor 81 Tahun 1928 pasal 6 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Barang milik Pemerintah

Yang dimaksud ialah semua senjata, pakaian dinas dan alat perlengkapan ABRI, meskipun yang menggadaikan adalah orang sipil, juga perlengkapan milik Pemerintah lainnya yang diberikan kepada pegawai sebagai pinjaman.

2. Bahan makanan dan bahan yang mudah busuk / rusak, termasuk makanan / minuman dalam kaleng, botol atau peti, juga segala macam obat, tembakau dan sebagainya.

3. Barang yang amat kotor

Yang dimaksud ialah barang yang tidak termasuk dalam salah satu larangan untuk diterima sebagai barang jaminan, tetapi keadaanya terlalu kotor.

4. Barang yang memerlukan surat izin atau dilarang penjualannya kalau dilelang, seperti senjata api dan bagian – bagiannya, mesiu, senapan angin dan candu kecuali sepeda motor, televisi dan radio.

5. Barang yang dapat menimbulkan kebakaran / letusan, seperti petasan, bensin.

6. Barang yang tidak tetap harganya atau sukar untuk ditetapkan taksirannya, seperti barang – barang purbakala, buku – buku, alat pemotret (alat berlensa).

Selain itu ditetapkan juga barang yang tidak boleh diterima sebagai barang jaminan selain yang telah dilarang di atas, yaitu antara lain :

1. Barang yang disewa-belikan.
2. Reng – rangen kain batik yang ada cap pemiliknya.
3. Barang dagangan dalam jumlah besar, seperti kain / sarung, arloji, dan sebagainya.

4. Berlian dan paset yang lepasan dan emas pasir.⁹

Dalam pegadaian terdapat penggolongan – penggolongan besarnya pinjaman untuk mendapatkan kredit bagi para nasabahnya. Dalam pelaksanaan pemberian pinjaman tersebut disertai dengan penetapan jangka waktu kredit dan penetapan suku bunganya.

Perkembangan Pinjaman yang diberikan PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang kepada nasabah berdasarkan golongan – golongan dalam 6 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel. 2

PINJAMAN YANG DIBERIKAN (1998 - 2003)

dalam jutaan rupiah

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Golongan A	183,139	153,748	166,954	184,517	195,427	196,747
Golongan B	375,912	414,274	416,254	454,839	508,784	572,045
Golongan C	679,517	921,618	1,023,682	1,241,455	1,616,047	1,177,045
Golongan D	739,032	1,581,316	1,619,161	2,337,583	2,633,738	3,359,044
JUMLAH	1,977,600	3,070,956	3,226,051	4,218,394	4,953,996	5,304,881

Sumber data : Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang tahun 2004

Dewasa ini Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang, mengalami perkembangan cukup pesat, terutama peningkatan kredit yaitu golongan C dan D. Kesulitan memperoleh kredit menyebabkan masyarakat mau tidak mau harus menggunakan jasa pegadaian. Dengan adanya krisis moneter tahun 1998, pada umumnya tingkat pendapatan keluarga tetap sedangkan pengeluaran semakin

⁹PERJAN Pegadaian, Buku Tata Cara Menaksir, (Jakarta : Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, 1981), halaman 41

meningkat. Oleh sebab itu banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang dengan ketentuan mau menggadaikan barang miliknya.

PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang mewajibkan nasabah untuk menyerahkan barang sebagai jaminan seperti emas, berlian, barang elektronik, kendaraan bermotor dan lain – lain. Barang jaminan tersebut terlebih dahulu ditaksir oleh juru taksir sebelum ditetapkan berapa besar pinjaman yang dapat diberikan.

Penaksiran barang jaminan tersebut mengacu pada harga pasar setempat. Untuk menghindari kerugian yang mungkin terjadi PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang selalu mengasuransikan seluruh barang jaminan kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero). Berikut adalah tabel besarnya premi asuransi yang dibayarkan berdasarkan golongan – golongan.

**BESARNYA ASURANSI YANG DIBERIKAN
BERDASARKAN GOLONGAN**

Tabel .5

Golongan	Besarnya asuransi (dalam rupiah)
A	500
B	2.000
C	5.000
D	15.000

Sumber : Pegadaian Cabang Depok Semarang tahun 2004

1. Untuk golongan A besarnya uang pinjaman
Rp. 10.000 s/ d Rp. 40.000 besarnya asuransi Rp. 400,-
2. Untuk golongan B besarnya uang pinjaman
Rp. 40.500 s/d Rp. 150.000 besarnya asuransi Rp. 2.000,-
3. Untuk golongan C besarnya uang pinjaman :
Rp. 151.000 s/d Rp. 500.000 besarnya asuransi Rp. 5000,-
4. Untuk golongan D besarnya uang pinjaman :
Rp. 510.000 ke atas besarnya asuransi Rp. 15.000,-

Berikut adalah tabel perkembangan jumlah penerimaan barang jaminan berdasarkan golongan selama 6 tahun terakhir di PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang .

Tabel. 4

**JUMLAH PENERIMAAN BARANG JAMINAN BERDASARKAN GOLONGAN
(1998 – 2003)**

dalam ribuan potong

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Golongan A	11,836	11,901	12,624	12,768	12,850	13,032
Golongan B	4,833	4,936	5,547	5,692	5,987	6,874
Golongan C	2,614	3,393	3,576	4,338	5,548	5,134
Golongan D	638	1,237	1,288	1,728	2,583	2,654
JUMLAH	19,921	21,467	23,035	24,526	26,966	27,694

Sumber data : Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang tahun 2004

Peningkatan barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang cukup pesat terutama untuk golongan A dan B. Hal ini disebabkan karena biasanya barang yang dijaminkan untuk pinjaman golongan A dan B relatif mudah didapat seperti radio, tape, dan perabot rumah tangga lainnya.

Perum pegadaian dalam menerima nasabah atau debitur menurut H. Eddy Warnoto,SH selaku Kepala Cabang PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang yang akan menebus barang gadai yang dijadikan jaminan akan berusaha meneliti secermat mungkin terhadap Surat Bukti Kredit yang digunakan untuk mengambil barang gadai tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari jika terjadi kemungkinan Surat Bukti Kredit (SBK) tersebut adalah palsu atau hasil temuan saja, sehingga kalau tidak dilakukan pemeriksaan yang diteliti, maka dikhawatirkan bisa merugikan nasabah pemilik barang yang sebenarnya dan juga pihak PERUM Pegadaian itu sendiri. Misalnya pemilik barang tersebut belum bisa mengambil barangnya karena Surat Bukti Kredit (SBK) hilang, kemudian Surat Bukti Kredit (SBK) tersebut telah ditemukan oleh seseorang dan orang tersebut berusaha untuk mengambil barang gadai yang bukan haknya atau miliknya. Jadi dalam hal ini ada itikad buruk dari seseorang yang ingin menguasai barang yang bukan miliknya. Untuk itu kepada para nasabah / debitur yang merasa Surat Bukti kreditnya hilang diharapkan segera untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak PERUM pegadaian yang dilengkapi surat kehilangan dari pamong praja serendah – rendahnya Camat dan diperkuat dari Kepolisian setempat yang menyatakan bahwa benar – benar orang tersebut telah kehilangan SBK atas miliknya. Kemudian dengan surat kehilangan tersebut, digunakan untuk membuat SBK berupa turunannya yang disebut Surat Bukti kredit “ Dwi Lipat “ atau lembar kedua. Hal

serupa juga berlaku untuk Surat Bukti Kredit yang rusak, sehingga tidak bisa dibaca lagi.¹⁰

Untuk itu pihak PERUM Pegadaian tidak gampang atau mudah menyerahkan barang gadai kepada pembawa Surat Bukti Kredit yaitu selain untuk menghindarkan bahwa surat tersebut hanya hasil temuan saja, juga untuk menghindarkan bahwa kalau terjadi Surat Bukti Kredit tersebut dipalsukan, maka untuk itu diperlukan ketelitian dari petugas dalam menerima Surat Bukti Kredit.

Jika Surat Bukti Kredit (SBK) yang digunakan untuk melunasi yang dibawa kepada kasir terdapat tulisan yang diduga dipalsukan, maka Surat Bukti Kredit (SBK) tersebut harus ditahan untuk dijadikan barang bukti, sedangkan orang yang membawanya harus diserahkan kepada Polisi / kepada pihak yang berwajib.

Dalam pelaksanaan gadai di pegadaian ada yang dinamakan gadai ulang, gadai ulang ini mempunyai arti yaitu memperpanjang jangka waktu kredit / peminjaman.

Adanya gadai ulang tersebut adalah atas kemauan dari si pemilik barang (debitur). Selama pemilik barang (debitur) memperpanjang jangka waktu kreditnya, si debitur masih menyerahkan penguasaan hak gadainya pada pegadaian.

Gadai ulang terjadi apabila jatuh tempo peminjaman yang pertama sudah berakhir kemudian si debitur memperpanjang lagi jangka waktu kreditnya, dengan syarat ia harus membayar terlebih

¹⁰ Eddy Warnoto, Wawancara, Kepala PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang (Semarang, 31 Maret 2004)

dahulu bunga yang sudah jatuh tempo tersebut. Pada gadai ulang ini debitur juga dapat mengangsur atau mencicil pinjamannya, sehingga dengan demikian akan mengurangi jumlah pinjamannya. Dengan mengangsur pinjaman si debitur tidak terlalu berat untuk melunasi sisa kreditnya, karena biasanya bunga yang harus dibayar oleh debitur itu dihitung dari sisa pinjamannya.¹¹ Adapun contohnya adalah sebagai berikut :

Tuan A menggadaikan sebuah radio merk “ Tens “ pada tanggal 10 Oktober 2003 di PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang maka berdasarkan ketentuan dari PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang batas maksimum / jatuh tempo pemberian kredit adalah 120 hari (4 bulan) yaitu tanggal 10 Februari 2004, jika ternyata Tuan A masih ingin memperpanjang jangka waktu kreditnya maka Tuan A dapat mengajukan permohonan kepada PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang dengan syarat Tuan A harus membayar bunga dari kredit yang sudah jatuh tempo tersebut.

Hak gadai berakhir dengan pelunasan uang pinjaman, nasabah (pemberi gadai) yang akan mengembalikan pinjamannya membawa SBK ke PERUM Pegadaian dan menyerahkan SBK itu kepada kasir yang seterusnya menghitung bunga pinjaman. Bunga pinjaman tidak dibayar bulanan, walaupun dihitung berdasarkan bulan (kalender). Bunga dibayar pada saat pinjaman dilunaskan setelah pinjaman dan

¹¹ Eddy Warnoto, Wawancara, Kepala PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang (Semarang, 31 Maret 2004)

¹² Eddy Warnoto, Wawancara, Kepala PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang (Semarang, 31 Maret 2004)

bunga dilunaskan, dan pejabat Pegadaian menyerahkan benda gadai kepada nasabah.

Tarif sewa modal adalah tarif bunga atau sewa modal yang ditetapkan setiap 15 (lima belas) hari dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau Surat Edaran No. 34 Tahun 2003.

Perhitungan sewa modal atau bunga golongan A, B, C, D dihitung per 15 hari. Satu hari sampai dengan 15 (lima belas) hari penuh. Batas waktu pelunasan kredit untuk golongan A, B, C, dan D ialah 120 hari (menurut kalender) atau selama 4 bulan. Maksud dari penggolongan tersebut yaitu untuk dapat menentukan besar pinjaman yang dapat diperoleh nasabah setelah melihat taksiran dari barang jaminan.

Besarnya jumlah pelunasan yang harus dibayar oleh nasabah terdiri dari :

1. Pokok Pinjaman

Uang pinjaman adalah yang tercantum dalam SBK dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (nasabah dan pihak Pegadaian).

2. Sewa modal atau bunga

Tarif bunga atau sewa modal ditetapkan setiap 15 hari dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau Surat Edaran No. 34 tahun 2003.

3. Jangka waktu

- Jangka waktu maksimal 120 hari.
- Cara perhitungan jumlah hari yaitu kredit gadai sampai dengan tanggal menebus atau tinggal jatuh tempo

Perkembangan jumlah nasabah di PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang dalam meningkatkan pangsa pasar terbagi atas 5 (lima) sektor yaitu :

1. Sektor Petani : Nasabah meminjam untuk keperluan usaha pertanian.
2. Sektor Nelayan : Nasabah meminjam untuk keperluan usaha nelayan.
3. Sektor Industri : Nasabah meminjam untuk keperluan usaha industri.
4. Sektor Pedagang : Nasabah meminjam untuk keperluan usaha dagang
5. Sektor lain – lain : Nasabah meminjam untuk keperluan di luar usaha - usaha tersebut.

Perkembangan jumlah penerimaan barang jaminan berdasarkan pada bidang usaha dari nasabah PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang (enam) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel. 5

**JUMLAH PENERIMAAN BARANG JAMINAN BERDASARKAN
BIDANG USAHA NASABAH
(1998 - 2003)**

dalam ribuan potong

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Petani	1,745	1,526	1,212	2,145	2,142	1,954
Nelayan	2,522	2,732	1,011	1,033	2,458	2,456
Industri	3,112	5,144	8,320	8,400	8,441	9,235
Pedagang	9,985	9,986	9,990	9,997	10,453	10,461
Lain – lain	2,557	2,079	2,502	2,951	3,472	3,588
JUMLAH	19,921	21,467	23,035	24,526	22,066	27,694

Sumber data : Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang tahun 2004

Jumlah penerimaan barang jaminan berdasarkan dari jenis bidang usaha nasabah tertinggi dipegang oleh bidang industri dan perdagangan mengingat kotamadia Semarang merupakan kota industri dan perdagangan yang sedang berkembang sehingga banyak masyarakat dalam bidang usaha ini menggadaikan barangnya untuk menambah modal usaha .

Kegiatan usaha lain dari PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang adalah jasa taksiran dan jasa titipan yang diperkenalkan oleh PERUM Pegadaian cabang Depok Semarang pada tahun 1994.

Jumlah pendapatan jasa taksiran dan jasa titipan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel .6

**JUMLAH PENDAPATAN JASA TAKSIRAN DAN JASA TITIPAN
(1998 - 2003)**

dalam ribuan rupiah

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Jasa taksiran	14,290	29,524	17,798	14,313	26,992	15,165
Jasa titipan	33,991	48,941	7,378	11,054	16,032	10,220
JUMLAH	48,281	78,465	25,176	25,367	43,024	25,385

Sumber data : Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang tahun 2004.

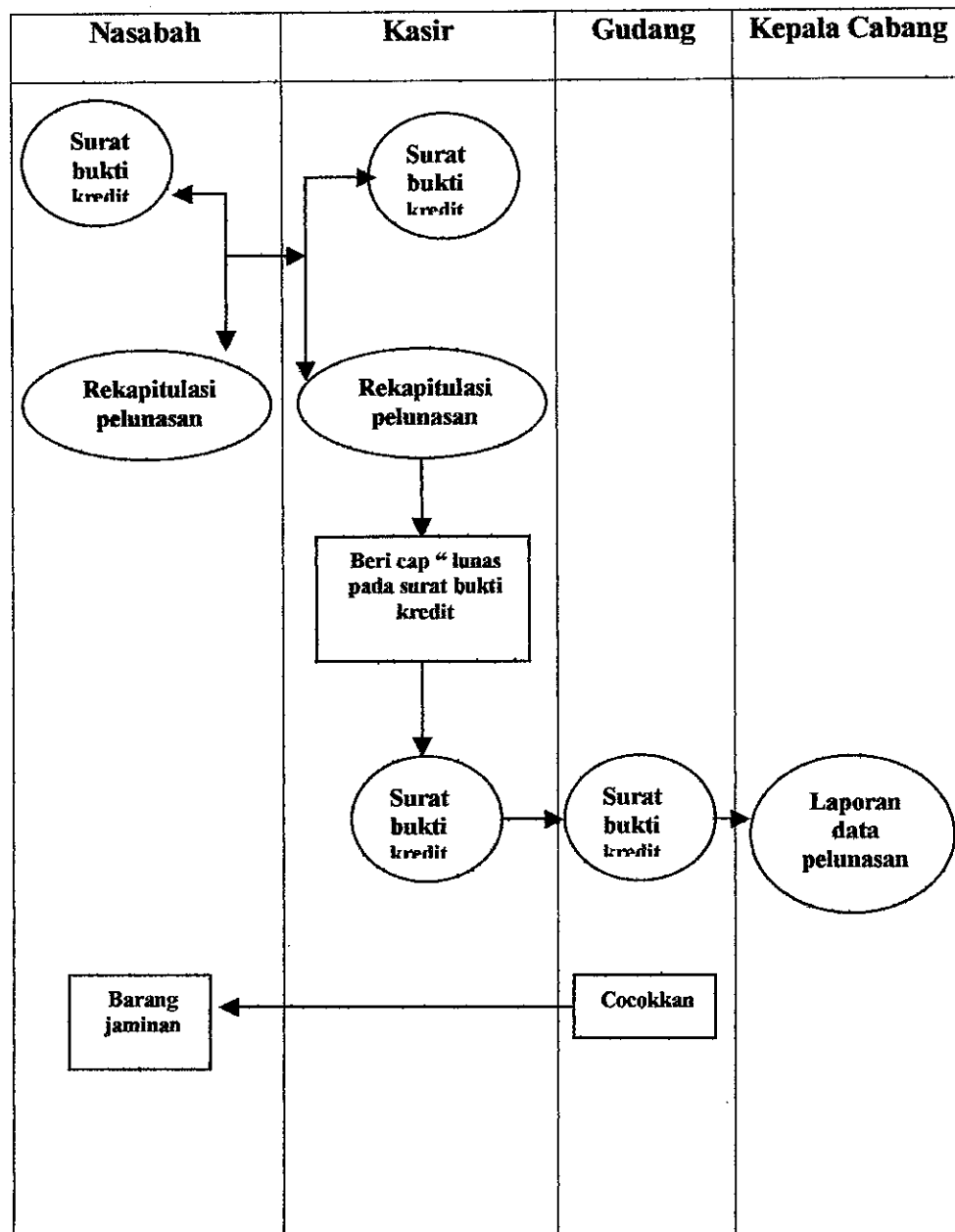
Adapun pengertian jasa taksiran dan jasa penitipan adalah sebagai berikut :

- Jasa taksiran adalah pemberian layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui berapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimilikinya seperti emas, berlian, batu permata dan lain – lain.
- Jasa titipan adalah pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang – barangatau surat berharga yang dimilikinya, agar tetap aman dan terjaga dengan baik.

Pelanggan jasa titipan ini adalah orang – orang yang ingin memperoleh rasa aman terhadap harta miliknya dari ancaman pencurian atau perampokan. Jasa ini juga bermanfaat bagi orang – orang yang akan pergi meninggalkan rumah dalam waktu lama seperti misalnya menunaikan ibadah haji, pergi keluar kota dan mahasiswa yang sedang berlibur.

Jumlah pendapatan jasa taksiran dan jasa titipan meningkat pada tahun 1999. hal ini terjadi disebabkan karena banyak terjadinya kerusuhan dan banyaknya tindak kejahatan akibat krisis moneter pada tahun 1998

Gambar. 2 : Prosedur Pelunasan pinjaman



Sumber data : PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang

Prosedur pelunasan kredit gadai adalah sebagai berikut :

a. Nasabah

1. Menyerahkan SBK asli
2. Menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan sesuai dengan jumlah yang harus dibayar.
3. Menerima kitir SBK asli bagian luar (L) sebagai tanda bukti pengambilan barang jaminan.
4. Menerima barang jaminan yang telah ditebus pada kitir SBK asli bagian luar (L)

b. Kasir

1. Menerima SBK asli dari nasabah
2. Menerima keabsahan SBK yang diterima
3. Melakukan perhitungan jumlah yang harus dibayar oleh nasabah yaitu : Pokok Pinjaman + Sewa Modal
4. Menerima jumlah pembayaran dari nasabah
5. Menerbitkan dan menyerahkan Slip Pelunasan (SP) kepada nasabah sebagai tanda bukti pelunasan.
6. Membubuhkan cap lunas, tanggal dan paraf pada SBK asli yang dilunasi, baik pada badan SBK, kitir dalam (D) dan kitir luar (L)
7. Melakukan distribusi SBK :
 - Kitir bagian dalam (D) kepada gudang
 - Kitir bagian luar (L) kepada nasabah
 - Badan SBK kepada bagian administrasi.

c. Bagian gudang

1. Menerima kitir SBK bagian dalam (D)
2. Memeriksa cap lunas, tanggal dan paraf kasir.
3. Mengambil barang jaminan ke gudang dengan cara mencocokkan kitir SBK bagian dalam (D) dengan kitir SBK yang menempel di barang jaminan.
4. Menyerahkan barang jaminan kepada nasabah dengan cara mencocokkan nomor kitir SBK bagian dalam (D) dengan kitir SBK bagian luar (L) yang dipegang nasabah.
5. Apabila telah cocok atau sesuai barang jaminan dapat diberikan kepada nasabah pembawa kitir SBK bagian luar.
6. Melakukan pencatatan ke dalam Buku Gudang.
7. Setiap akhir jam kerja melakukan pencocokkan atau pemeriksaan :
 - a. Mencocokkan kitir dwilipat (lembar ke 2) SBK asli yng dimasukkan ke dalam liaspem dengan buln kredit, nomor rubrik dan uang pinjaman.
 - b. Mencocokkan jumlah kitir yang ada dengan jumlah kitir pada pengeluaran barang jaminan.

d. Bagian Administrasi

1. Mencatat setiap transaksi pelunasan atas dasar badan SBK yang diterima dari kasir pada Buku Pelunasan, Buku Kas dan Ikhtisar Kredit dan Pelunasan
2. Membuat Rekapitulasi Pelunasan dan mencocokkannya dengan Buku Gudang dan Buku Pelunasan.

Proses pengembalian kredit samapai penerimaan kembali barang jaminan, memakan waktu kurang lebih 15 menit serta tidak dikenakan pungutan lain kecuali sewa modal dan biaya asumsi. Dan setiap uang pinjaman dapat dilunasi tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu atau jatuh tempo.

2. Praktek Lelang Di PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang

Apabila debitur tidak menebus barangnya (wanprestasi), maka barang akan dilelang oleh pegadaian. Untuk lebih mengetahui pelaksanaan lelang di pegadaian, penulis akan menguraikan pelaksanaan lelang di Pegadaian secara garis besar

Sebelum lelang dilaksanakan ada yang dinamakan dengan persiapan lelang. Hal – hal yang penting di dalam persiapan lelang, antara lain :

1. Paling cepat tiga hari sebelum lelang, barang yang akan dilelang dikeluarkan dari tempat penyimpanannya. Barang yang telah dikeluarkan dari gudang tersebut kemudian dicocokkan dengan keterangan pada Surat Bukti Kredit (SBK).

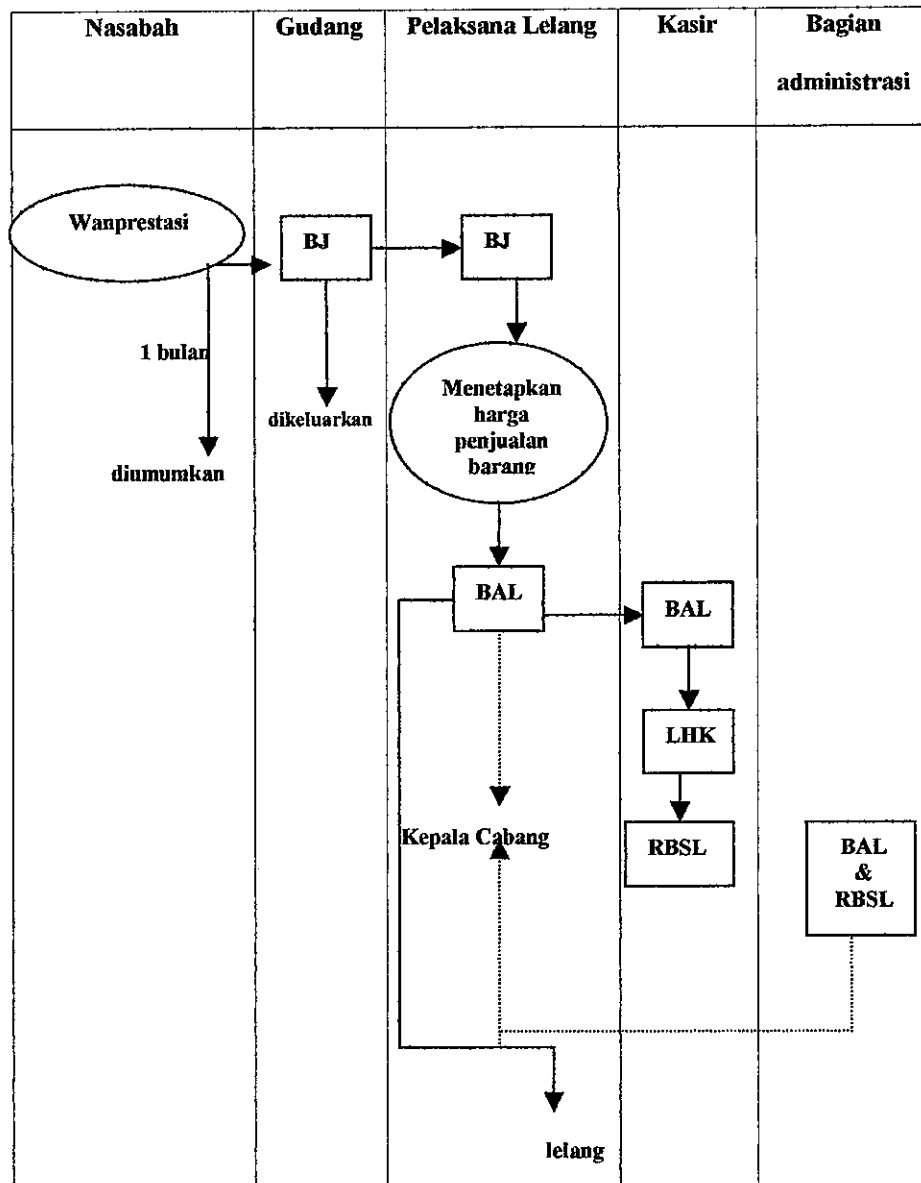
2. Pada hari lelang barang diserahkan oleh penyimpan kepada pimpinan lelang.
3. Pemimpin lelang membentuk suatu panitia yang terdiri dari pemimpin lelang dan dua orang pegawai (diantaranya serendah – rendahnya seorang penaksir atau pegawai yang sudah lulus kursus calon penaksir) sebagai anggota.
4. Kemudian barang yang telah dilakukan persiapan lelang tersebut dimasukkan ke dalam suatu tempat penyimpanan dan barang tersebut kemudian menjadi tanggung jawab si pemimpin lelang.

Pada hari pelaksanaan lelang, hal – hal penting antara lain :

1. Seperempat jam sebelum lelang dimulai, Surat Bukti Kredit (SBK) dan barang – barang yang akan dilelang dibawa ke tempat lelang di bawah pengawasan Kepala Cabang (Kacab) sendiri.
2. Lelang dipimpin oleh Kepala Cabang sendiri. Apabila Kepala Cabang berhalangan sah, maka lelang boleh dipimpin oleh wakilnya.
3. Pada waktu lelang, Kepala Cabang dibantu oleh seorang pemegang kas, seorang pegawai untuk mengisi keterangan – keterangan yang penting pada waktu lelang di buku lelang dan seorang lagi untuk penawaran lelang.
4. Barang – barang harus dilelangkan menurut urutan nomor Surat Bukti Kredit (SBK).

5. Penawar lelang menyebut dengan suara yang jelas disertai dengan keterangan yang pendek tentang barang yang akan dijual, yaitu sesudah keterangan – keterangan itu dibacakan oleh pemimpin lelang. Cacat dan ciri barang harus diumumkan pada waktu lelang untuk mencegah pengaduan di kemudian hari.
6. Pemimpin lelang harus mengawasi supaya barang – barang jangan sampai dijual terlalu cepat. Kepada para pembeli harus diberikan waktu yang cukup untuk menawar, akan tetapi waktu tersebut dua kali oleh penawar lelang, kemudian ditanyakan kepada publik apakah masih ada penawaran yang lebih tinggi. Jika ternyata tidak ada penawaran lagi, barulah harga penjualan ditetapkan dengan didahului perkataan “ tiga kali “.
7. Pada waktu lelang, barang yang tidak disukai oleh pembeli tidak boleh dijadikan satu dengan barang yang disukai oleh pembeli, karena jika dijadikan satu maka uang kelebihan dari masing – masing barang tidak dapat ditetapkan dan hal ini akan dapat merugikan para nasabah/pemilik barang yang bersangkutan.
8. Biasanya pelaksanaan lelang diundur ± 1 (satu) jam oleh pemimpin lelang untuk memberikan kesempatan pada debitur untuk menebus barangnya.

**Gambar. 4. Prosedur Pelaksanaan Lelang di Perum Pegadaian
Cabang Depok Semarang**



Catatan :

BJ : Barang jaminan

BAL : Berita Acara Lelang

LHK : Laporan Harian Kas

RBSL : Register Barang Sisa Lelang

Sumber : Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang

Prosedur lelang adalah sebagai berikut :

a. Pelaksana lelang

1. Menyiapkan Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan yang akan dilelang dengan dilampiri Daftar Barang Jaminan yang akan dilelang, Formulir Penjualan lelang beserta barang jaminannya.
2. Mencocokkan dengan fisik barang jaminan yang akan dilelang.
3. Menetapkan harga penjualan lelang dengan pedoman sebagai berikut :
4. Apabila taksiran baru lebih rendah dari uang pinjaman + sewa modal penuh, maka harga minimal lelang harus sebesar uang pinjaman + sewa modal dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh.
 - Apabila taksiran baru lebih tinggi dari uang pinjaman + sewa modal, maka harga minimal lakunya lelang adalah sebesar uang pinjaman maksimal berdasarkan taksiran baru + sewa modal penuh berdasarkan uang pinjaman baru.
 - Setiap barang jaminan yang telah laku dilelang, kepada pembelinya dibebankan biaya lelang pembeli sebesar 9 % dan 0.7 % untuk dana sosial.
5. Penjualan harga lelang didasarkan kepada penawaran tertinggi dan disetujui oleh pelaksana lelang dan langsung dicatat pada Daftar Rincian Penjualan Lelang.
6. Setelah lelang dibuat Berita Acara Lelang (BAL) dan menyerahkan kepada kasir bersama uang pendapatan lelang.

Untuk barang – barang yang tidak laku dilelang pada Register barang Sisa Lelang (RBSL).

b. Kasir

1. Menerima BAL, RBSL, dan uang hasil penjualan lelang dari pelaksana lelang.
2. Atas dasar BAL, dan uang tunai yang diterima dicatat pada Laporan Harian Kas (LHK) dan uang disimpan di brankas BAL dan RBSL kemudian diserahkan kepada petugas bagian administrasi

c. Bagian Administrasi

1. Menerima BAL dan RSBL dari ksir
2. Mencatat nomor – nomor barang jaminan yang akan dilelang dari Buku Kredit dan membuat Buku Penjualan Lelang.
3. Berdasarkan bukti – bukti tersebut dibuat Kas Debet dan dicatat dalam buku Kas.

Ada kalanya setelah pelelangan dilakukan terdapat uang kelebihan yang merupakan hak dari nasabah untuk menerimanya, uang kelebihan, yaitu hasil penjualan dalam lelang setelah dikurangi uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang, dan prosedur pembayaran uang kelebihan tersebut adalah sebagai berikut :

. a. Kasir

1. Menerima SBK dari nasabah, kemudian memeriksa dan menghitung uang kelebihan lelang.

2. Memintakan persetujuan kepada Kepala Cabang atau kelebihan lelang
3. Atas dasar SBK, mencatat tanggal pembayaran pada Buku Penjualan Lelang dan menyerahkan lembar ketiga bukti pembayaran uang kelebihan.
4. Menerima SBK yang sudah ditandatangani oleh Kepala Cabang.
5. Membayar uang kelebihan lelang kepada nasabah, atas dasar SBK tersebut dicatat pada Laporan Harian Kas.

b. Bagian Administrasi

Menerima SBK dari kasir, selanjutnya dicatat pada administrasi terkait

Apabila ada orang yang minta uang kelebihan dan ternyata Surat Bukti Kredit (SBK) nya hilang, sedangkan barangnya sudah dilelang, dalam hal ini diselesaikan oleh Kepala Cabang dengan memperhatikan petunjuk sebagai berikut :

1. Kepada yang bersangkutan diperintahkan untuk membuat surat laporan tentang kehilangan SBK dari polisi / kepala desa.
2. Setelah dicek oleh pegadaian kemudian pegadaian membuat surat keterangan bahwa SBK milik nasabah telah hilang.
3. Setelah pegadaian mendapatkan menerbitkan surat pengganti SBK yang hilang.

Dengan diterbitkan SBK yang baru, maka nasabah mendapatkan barang jaminannya. Tetapi biasanya pegadaian

menunggu sampai jatuh tempo pelunasan kredit berakhir, hal ini untuk melindungi pemilik yang sah.¹³

Menurut Aturan Dasar Pegadaian Nomor 81 Tahun 1928 Pasal 21 ayat (4) bahwa uang kelebihan hanya dapat dibayarkan selama satu tahun sesudah tanggal lelang dari barang yang bersangkutan. Apabila waktu tersebut tidak dipergunakan maka kedaluwarsa dan uang kelebihan menjadi milik negara.

B. Jika Obyek Gadai merupakan barang curian, milik orang lain.

1. Jika obyek Gadai merupakan barang curian

Dalam praktek gadai di PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang diawali dengan adanya perjanjian utang piutang / perjanjian kredit antara kreditur yang dalam hal ini adalah PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang dan debitur (nasabah) sebagai perjanjian pokoknya yang diikuti dengan menggadaikan sebuah barang bergerak milik debitur sebagai jaminan pelunasan atas hutangnya. Menurut H. Eddy Warnoto, SH , Kepala PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang, bahwa apabila terjadi si debitur menggadaikan barang diperolehnya dengan jalan tidak sah, maka hal tersebut harus dilihat dari itikad baik atau buruknya si kreditur (pihak yang menerima barang).

Apabila kreditur beritikad baik dalam arti ia beranggapan bahwa yang membawa barang bergerak tersebut adalah eigenaar (pemilik barang yang sebenarnya), maka kreditur dalam hal ini akan dilindungi oleh

¹³ Eddy Warnoto, Wawancara, Kepala PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang (Semarang, 12 April 2004)

hukum. Dalam pelaksanaan gadai pihak pegadaian selalu beritikad baik dalam menerima barang jaminan dari nasabahnya. Pihak pegadaian mendasarkan hal tersebut pada Pasal 1977 (1) KUH Perdata yang pada dasarnya mengatakan bahwa seseorang yang memegang (menguasai) barang bergerak dianggap sebagai pemilik dari barang tersebut. Dari pasal tersebut ditafsirkan oleh pihak pegadaian, bahwa orang yang memegang barang bergerak itu adalah pemiliknya. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam teori legitimasi yaitu bezit bukan eigendom, tetapi bagi siapa yang dengan itikad baik menduga bezitter sebagai eigenaar adalah “ safe “ (aman).¹⁴ . Bezit itu membuktikan orang yang menguasai bendanya sebagai yang berhak penuh, sebagai eigenaar. Menurut teori legitimasi, pasal 1977 itu sebenarnya mempunyai dua macam fungsi. Kedua fungsi itu adalah :¹⁵

1. Fungsi Prosessuil (keacaraan).

Fungsi Prosessuil ini hanya berlaku dalam suatu proses pengadilan dalam mana pihak yang satu memperoleh suatu benda bergerak dari pihak yang lain (atau dari pewaris pihak yang lain itu) Boleh dikatakan hanya dalam perkara antara tangan kesatu melawan tangan kedua saja. Dalam perkara seperti ini pihak tergugat (tangan kedua) yang mendalilkan bahwa dirinya adalah eigenaar dari suatu benda bergerak, hanya perlu membuktikan bezitnya saja Jika tergugat (tangan kedua)

¹⁴ Purwahid Patrik, Hukum Benda, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tahun 1998 halaman 54

¹⁵ Ibid, halaman 56

telah dapat membuktikan bezitnya, maka penggugat (tangan kesatu) hanya dapat dimenangkan dalam perkara apabila ia dapat membuktikan adanya hak eigendom yang ada padanya.

2. Fungsi material

Fungsi material ini berlaku dalam perkara antara tangan kesatu dengan tangan ketiga atau keempat dan seterusnya. Menurut teori legitimasi, seorang yang telah memperoleh benda bergerak tidak atas nama dari orang lain yang nampaknya berwenang untuk menyerahkan benda tersebut, walaupun ia itu sesungguhnya tidak berwenang, menjadi eigenaar benda tersebut asalkan penyerahannya dilakukan dengan alasan hak yang sah. Disamping adanya syarat tersebut harus dipenuhi pula syarat – syarat :

a. Bezitter harus beritikad baik dalam hal ini yang dimaksudkan adalah “ tangan ketiga “. Tangan ketiga ini dianggap beritikad baik manakala pada waktu memperoleh bendanya ia tidak mengetahui atau tidak dapat menyangka , bahwa tangan kedua yang menyerahkan benda itu kepadanya tidak berwenang untuk menyerahkan benda tersebut.

b. Bezit diperoleh tidak dengan cuma – cuma

Bezit atas suatu benda diperoleh tidak dengan cuma – Cuma apabila untuk memperoleh benda itu harus dengan” contra prestasi “, misalnya diperoleh karena jual beli. Jika bezit diperoleh dengan cuma – cuma, misalnya karena hibah,

maka pihak ketiga (atau keempat dan seterusnya) tidak dilindungi. Ia sebenarnya tidak menderita kerugian apapun dengan diberikannya hak kepada tangan kesatu dengan hak revindikasi.

- c. Bezit harus riil maksudnya yaitu tangan ketiga (keempat dan seterusnya) sebagai bezitter, harus menguasai sendiri bendanya, Dengan demikian harus ada penguasaan secara langsung dari bezitter atas bendanya. Dengan perkataan lain harus ada penyerahan nyata dari tangan kedua kepada tangan ketiga.
- d. Tangan kesatu telah menyerahkan kekuasaan atas bendanya dengan sukarela. Legitimasi yang diberikan oleh bezit tidak berlaku bagi yang berhak manakala tangan kesatu yaitu yang berhak tidak mempercayakan bendanya kepada kekuasaan orang lain. Bagi pemilik barang (tangan kesatu) apabila kehilangan atau kecurian bendanya, ia dapat menuntut kembali bendanya dari tangan siapapun dimana benda itu ditemukan tetapi harus membayar pihak ketiga sesuai dengan harga yang diperoleh oleh pihak kedua, hal ini sesuai dengan tafsiran dari pasal 582 KUH Perdata.

Di Perum Pegadaian hal tersebut menjadi dasar bagi penerimaan barang yang digadaikan oleh nasabah untuk menjadi jaminan sebagai pelunasan hutang. Namun sering pula terjadi benda atau barang yang digadaikan bukan milik pemberi gadai sendiri melainkan milik orang lain yang didapat

dari sewa menyewa, peminjaman maupun curian sehingga dapat menimbulkan masalah hukum apabila pemilik yang sebenarnya melakukan gugatan, seperti yang terjadi di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang dimana nasabah menggadaikan barang dari hasil curian dan peminjaman dari pihak ketiga.¹⁵ Walaupun demikian dalam persyaratan peminjaman kredit di pegadaian, pihaknya mengharuskan si nasabah (debitur) untuk menyerahkan kartu identitas diri dan khususnya untuk barang – barang jaminan berupa kendaraan bermotor pihaknya mengharuskan nasabah untuk menyertakan bukti – bukti kepemilikan kendaraan bermotor tersebut berupa fotocopy BPKB dan STNK. Karena pihak pegadai (kreditur) telah beritikad baik dalam perjanjian gadai tersebut, maka selayaknya apabila pegadai dilindungi oleh hukum.¹⁶

Kejadian yang pernah dialami oleh PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang adalah kasus barang yang digadaikan nasabah merupakan barang curian yang terjadi pada tahun 2000. Pihak Pegadaian tidak tahu atau mungkin tidak teliti kalau barang tersebut ternyata dari hasil pencurian, karena identitas nasabah telah dilampirkan dan hal tersebut menandakan bahwa si pegadai mempunyai itikad baik.

Adapun kasusnya adalah sebagai berikut :

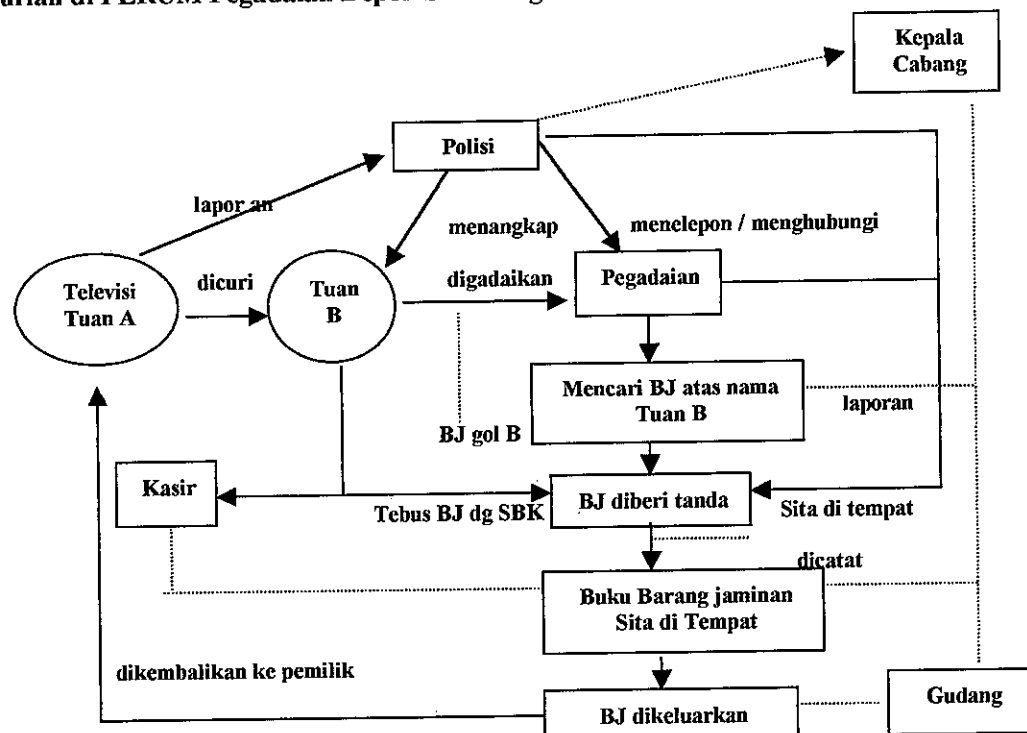
Seorang pemilik sebuah televisi berwarna merk “Sony” yaitu Tuan A, datang ke pegadaian dan menyatakan bahwa ia kehilangan barang tersebut dan ternyata telah digadaikan oleh kemenakannya sendiri yang

¹⁵ Eddy Warnoto, Wawancara, Kepala Cabang PERUM Pegadaian Depok Semarang (Semarang 12 April 2004)

¹⁶ Eddy Warnoto, Wawancara, Kepala PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang (Semarang, 12 April 2004)

bernama B. Hal itu diketahui oleh Tuan A yang merasa curiga terhadap B, dan setelah ditanya dengan baik – baik, akhirnya B mengaku kalau dirinya telah mencuri televisi tersebut dan memang benar kalau B ternyata telah menggadaikan barang tersebut di Pegadaian Cabang Depok Semarang dan mendapat pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Gambar. 5 Prosedur penyelesaian kasus barang jaminan merupakan barang curian di PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang



Sumber data : PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang tahun 2004
 Penyelesaian kasus :

Tuan A melaporkan perbuatan kemenakannya tersebut ke Polisi dan kemudian menangkap B yang tidak melakukan perlawanan, karena ia memang merasa bersalah atas kejadian tersebut. Pihak kepolisian

kemudian menelepon ke kantor Pegadaian Cabang Depok Semarang yang menyatakan bahwa barang yang digadaikan atas nama B yaitu sebuah televisi berwarna merk “Sony “ merupakan barang curian, kemudian pihak pegadaian segera mencari barang tersebut lalu memberi tanda pada barang tersebut. Para pihak yang bersangkutan yaitu Polisi, Tuan A dan B datang ke Pegadaian Cabang Depok Semarang dan ternyata barang tersebut masih ada dan belum ditebus oleh pelaku, selanjutnya polisi meminta barang tersebut untuk disita di tempat, tetapi barang itu harus dikeluarkan terlebih dahulu dari pegadaian dengan jalan ditebus atau dilunasi terlebih dahulu dengan memakai SBK yang ternyata ada di tangan B. Permasalahan tersebut selanjutnya diselesaikan secara kekeluargaan, dengan disaksikan oleh Kepala Cabang PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang. Barang tersebut kemudian ditebus oleh B dengan SBKnya dan akhirnya dikembalikan kepada Tuan A. Alasan polisi melakukan penyitaan barang adalah agar tersangka atau pelaku tidak melakukan pengrusakan, menghilangkan atau memindahkan barang tersebut yang akan digunakan sebagai barang bukti lebih lanjut. Dalam kasus ini Tuan A tidak melakukan gugatan ke Pengadilan, karena ia menganggap akan lebih memakan waktu jika harus berperkara di pengadilan, terlebih lagi barang yang menjadi masalah bernilai kecil, selain itu juga karena B langsung menyadari kesalahannya dan tidak dapat menyangkal bahwa ia memang melakukan pencurian barang milik pamannya.

Mengenai kasus pencurian di atas pihak pegadaian telah mempunyai prosedur yang akan dilakukan dalam rangka penyitaan barang curian sebagai salah satu upaya perlindungan hukum bagi pihak pegadaian agar pegadaian tidak disebut sebagai pihak penadah. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

1. Apabila ada pihak kepolisian / kejaksaan yang akan meminta barang jaminan, dilayani dengan sita di tempat, dengan membuat surat keterangan sita di tempat yang dilampiri foto barang jaminannya.
2. Surat keterangan sita di tempat tersebut dibuat rangkap dua, ditandatangani oleh pihak pegadaian dan kepolisian / kejaksaan dan pihak pengadilan, dan dicatat dalam Buku Barang Jaminan Sita Di Tempat.
3. Apabila pihak polisi / kejaksaan meminta informasi tentang barang tersebut, Kepala Cabang / pegawai dapat diberikan kesaksiannya melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setelah mendapat izin dari Kepala Kantor Daerah BAP dibuat rangkap 3, lembar 1 untuk kepolisian, lembar 2 untuk pegadaian dan lembar 3 untuk yang bersangkutan.
4. Apabila pihak kepolisian / kejaksaan mengusulkan penyelesaian perkara tersebut secara damai, dapat dilayani dengan melalui proses pelunasan. Penyerahan barang jaminan dilakukan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Kepala Cabang, kepolisian / kejaksaan dan si pelaku dan

kemudian barang tersebut diserahkan kepada pemilik sebenarnya.

Menurut Hardiman, S.H, apabila ada kasus barang gadai yang diperoleh dengan jalan tidak sah yang kemudian pada akhirnya barang tersebut disita oleh aparat penegak hukum (polisi) dan dikembalikan kepada yang berhak menerimanya, maka selanjutnya menurut beliau hal tersebut tidak mengurangi atau menghilangkan hak bagi si kreditur yang telah dirugikan itu untuk menuntut ganti rugi kepada si debitur. Mengenai masalah ganti rugi yang dituntut oleh pihak kreditur tersebut biasanya dalam praktek di pengadilan ganti rugi yang dikabulkan oleh hakim hanyalah ganti rugi yang benar – benar terjadi dan merupakan akibat yang langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh si debitur tersebut dan kerugian itu juga harus dapat dibuktikan oleh pihak yang menuntut ganti rugi serta ganti rugi yang dituntutpun harus dalam batas kewajaran. Sehingga ganti rugi yang sifatnya hanya perkiraan atau dugaan saja dalam praktek biasanya hal tersebut tidak akan dikabulkan oleh hakim. Dan untuk ganti rugi yang bersifat materiil hakim juga akan melihat pada faktor kepantasan, kepatutan dan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat.¹⁷

Tri Joko, berpendapat apabila terjadi kehilangan (kecurian) suatu barang bergerak, yang kemudian barang tersebut digadaikan pada pihak kreditur, maka dalam hal ini pemilik sebenarnya (eigenaar) dapat menuntut kembalinya barang yang hilang (dicuri) itu dari tangan siapa barang tersebut ditemukan (dalam hal ini misalnya barang yang hilang

¹⁷ Hardiman, Wawancara, Nasabah Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang, (Semarang, 12 April 2004)

tersebut berada di tangan kreditur). Sehingga dengan demikian pemilik yang sebenarnya (*eigenaar*) akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan terhadap pemilik sebenarnya (*eigenaar*) dalam menuntut kembalinya barang jangka waktunya tiga tahun sejak ia kehilangan barang tersebut. Tetapi hal itu juga tidak mengurangi hak bagi bagi si kreditur untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barang tersebut.¹⁸

2. Jika obyek gadai merupakan barang pinjaman

Bagi pegadaian, selama ada barang jaminan dan nasabah menyerahkan kartu identitas dirinya maka nasabah dapat segera memperoleh kreditnya dari petugas pegadaian. Bila barang yang digadaikan itu bukan miliknya sendiri menurut H. Eddy Warnoto,SH Kepala PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan gadai pihak pegadaian selalu beritikad baik dalam menerima barang jaminan dari nasabahnya. Pihak pegadaian mendasarkan hal tersebut pada Pasal 1977 (1) KUH Perdata yang pada dasarnya mengatakan, bahwa seseorang yang memegang (menguasai) barang bergerak dianggap sebagai pemilik dari barang tersebut, tetapi bila si debitur meminjam barang dari orang lain sebagai barang jaminan maka si debitur bisa menyerahkan barang jaminan dengan bukti surat kuasa dari si pemilik asli atau kwitansi pembelian (jual beli fiktif), dengan cara ini maka pihak PERUM Pegadaian menganggap sah barang yang

¹⁸ Tri Joko , *Wawancara*, Nasabah PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang (Semarang, 12 April 2004)

dijaminkannya itu.¹⁹ Menurut teori legitimasi dari segi fungsi prosessuil (keacaraan) dimana fungsi ini berlaku dalam suatu proses pengadilan dalam mana pihak yang satu memperoleh suatu benda bergerak dari pihak lain, Dalam perkara seperti ini pihak tergugat (tangan kedua) yang mendalilkan bahwa dirinya adalah eigenaar dari suatu benda bergerak, hanya membuktikan bezitnya saja . Jika tergugat (tangan kedua) telah dapat membuktikan bezitnya, maka penggugat (tangan kesatu) hanya dapat dimenangkan dalam perkara apabila ia dapat membuktikan adanya hak eigendom yang ada padanya.¹⁹

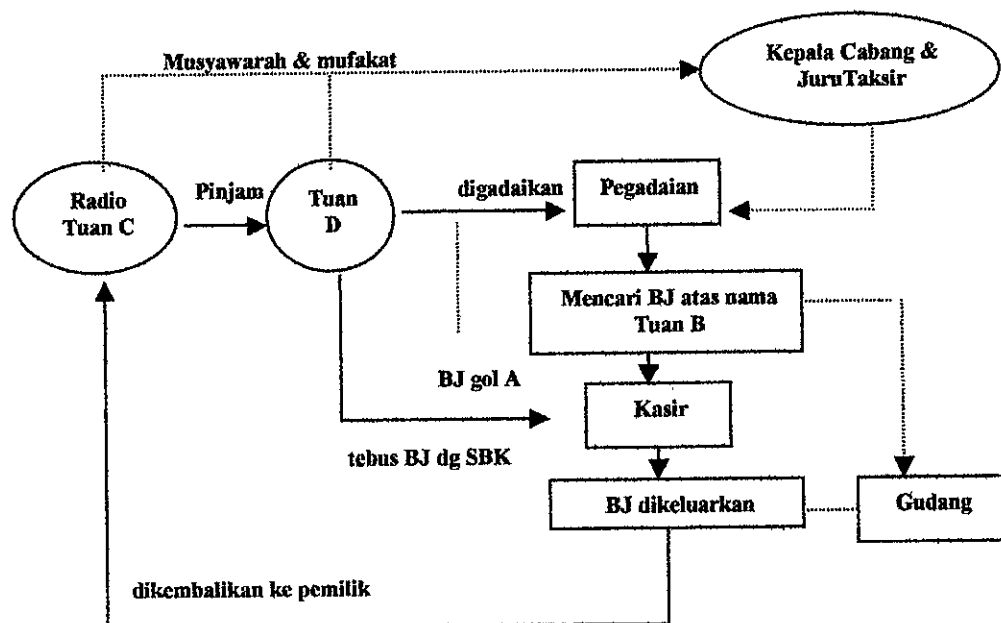
Kasus yang pernah terjadi di PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang mengenai barang yang dipinjam dan kemudian digadaikan oleh peminjam tanpa sepengetahuan pemilik terjadi pada tahun 2001. Adapun kasusnya adalah sebagai berikut :

Tuan C adalah pemilik dari sebuah radio merk “ Panasonic “ meminjamkan radio tersebut kepada D yang terhitung masih saudaranya, karena suatu ketika D kekurangan uang dan kemudian berniat untuk menggadaikan radio tersebut di PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang, maka sesuai dengan prosedur peminjaman kredit di pegadaian D menggadaikan barang yang dipinjamnya tersebut. Pihak Pegadaian tidak curiga mengenai kepemilikan barang tersebut karena siapa yang menggadaikan barang dianggap sebagai pemiliknya, selain itu D juga beritikad baik karena D memberikan KTPnya sebagai salah satu syarat

¹⁹ Eddy Warnoto, Wawancara, Kepala PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang (Semarang, 14 April 2004)

untuk melakukan kredit. Beberapa minggu kemudian saat D hendak menebus barang tersebut di PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang, tiba – tiba saja pemilik barang yang sebenarnya yaitu Tuan C juga sedang akan menggadaikan barangnya di pegadaian yang sama, kemudian terjadi percakapan diantara keduanya dan dari situlah Tuan C mengetahui kalau D ternyata telah menggadaikan barang miliknya yaitu radio merk “ Panasonic “ dan mendapat pinjaman sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Gambar. 6 Prosedur penyelesaian kasus barang jaminan merupakan barang pinjaman di PERUM Pegadaian Depok Semarang



Sumber data : PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang tahun 2004

¹⁹ Purwahid Patrik, Hukum Benda, (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998) halaman 54

Penyelesaian dari kasus tersebut adalah sebagai berikut :

Kasus tersebut diselesaikan di kantor PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang dan didahului dengan adanya musyawarah antara kedua belah pihak dengan didatangkan dua pihak yang lain yaitu Kepala Cabang Pegadaian dan juru taksirnya sebagai pihak yang mengerti tentang tata cara gadai. Setelah adanya kata mufakat untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan cara damai, maka barang yang berupa radio tersebut ditebus oleh D dengan SBKnya dan akhirnya dikembalikan kepada Tuan C sebagai pemilik sebenarnya dan dalam kasus ini eigenaar tidak melakukan gugatan ke pengadilan, karena Tuan C menganggap akan lebih memakan waktu jika harus berperkara ke pengadilan terlebih lagi barang yang menjadi masalah bernilai kecil, selain itu D juga sudah menyadari dan tidak menyangkal bahwa D memang bersalah karena melakukan penggelapan barang milik Tuan C.

Dengan adanya kedua kasus tersebut diatas yaitu barang jaminan dari hasil kejahatan (pencurian dan penggelapan) maka Eddy Warnoto, SH selaku Kepala Cabang PERUM Pegadaian Depok Semarang berpendapat bahwa pihak pegadaian mempunyai langkah – langkah untuk mengantisipasi hal – hal tersebut sebagai berikut :

1. Meminta copy identitas nasabah.
2. Meminta surat bukti kepemilikan barang (kuitansi pembelian dan surat – surat lain yang dinilai absah).

3. Sebaiknya agar nasabah membuat pernyataan sebagai pemilik barang di hadapan penaksir atau kepala cabang
4. Terhadap nasabah yang bukan pemilik barang jaminan, agar membuat Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup dan melampirkan copy kartu identitas masing – masing pihak dan dibuat dihadapan penaksir / kepala cabang
5. Apabila tidak bersedia memenuhi syarat tersebut sebaiknya ditolak.

Menurut Sutrisman, S.H bila kreditur memegang itikad baik dalam menerima barang jaminan dari debitur, dalam hal ini kreditur mendapatkan perlindungan hukum.²⁰

Sedangkan Bambang Waluyo, berpendapat untuk memperkuat data hendaknya si debitur menyertakan surat kuasa / surat persetujuan gadai dari si pemilik barang yang asli.²¹

C. Jika barang gadai rusak

Ada kalanya pada waktu pelunasan pinjaman / kredit ternyata barang jaminan seluruhnya / sebagian hilang / rusak disebabkan terbakar, basah, dimakan binatang atau sebab – sebab lain yang dalam keadaan biasa seharusnya dapat dicegah oleh PERUM Pegadaian seperti : kehilangan karena pencurian atau sebab kekeliruan dari (atau

²⁰ Sutrisman, Wawancara, Nasabah PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang , (Semarang, 14 April 2004)

²¹ Bambang Waluyo, Wawancara, Nasabah PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang (Semarang, 14 April 2004)

penggelapan oleh) pegawai PERUM Pegadaian. Apabila terjadi hal yang demikian maka nasabah akan mendapatkan ganti rugi dari PERUM Pegadaian karena jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan gadai itu, maka pihak PERUM pegadaian memenuhi unsur wanprestasi yang pertama, yakni tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya, yaitu memelihara barang jaminan gadai dari kerusakan atau kehilangan yng mungkin terjadi.

Dalam kaitannya dengan kewajiban pemegang gadai ini, dinyatakan bahwa kewajiban Pejabat Pegadaian adalah :²²

1. Menyimpan benda gadai dengan baik, sehingga tidak rusak atau nilainya turun.
2. Menanggung kerusakan yang terjadi karena kebakaran, atau sebab- sebab lain yang terletak dalam batas kewajiban menjaga dari pihak Pegadaian, tetapi jika barang gadai turun nilainya akibat tidak mendapat perawatan sehari – hari, pemilik tidak berhak mendapat ganti rugi.

Kasus banjir yang menimpa PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang pada tahun 1999 yang mengakibatkan kerusakan cukup serius pada sebagian besar Barang Jaminan (BJ) elektronik, sepeda motor dan mobil adalah contoh kasus yang menuntut tanggung jawab Pegadaian untuk mengganti segala kerugian nasabah.²³ Berikut tabel kerusakan barang -- barang jaminan akibat banjir pada tahun 1999 di PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang.

²² Mariam Darus Badruzaman, Bab – Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia, (Bandung : Alumni, 1984) halaman 74.

Tabel.7

BARANG JAMINAN YANG RUSAK AKIBAT BANJIR

TAHUN 1999

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Televisi	10
2	Radio	15
3	Komputer	5
4	Sepeda Motor	4
5	Mobil	1

Sumber data : Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang 2004

Kerusakan akibat bencana banjir paling banyak terjadi pada barang – barang elektronik seperti televisi, radio dan komputer dikarenakan barang – elektronik tersebut rawan sekali terhadap air.

Terhadap kasus seperti itu menurut Bapak H. Eddy Warnoto,SH selaku Kepala cabang PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang mengemukakan uang ganti rugi yang diperoleh nasabah adalah nasabah adalah sebesar 125% dari taksiran dan hanya boleh dibayarkan sesudah uang pinjaman beserta bunga yang harus dibayar telah diterima dari peminjam.

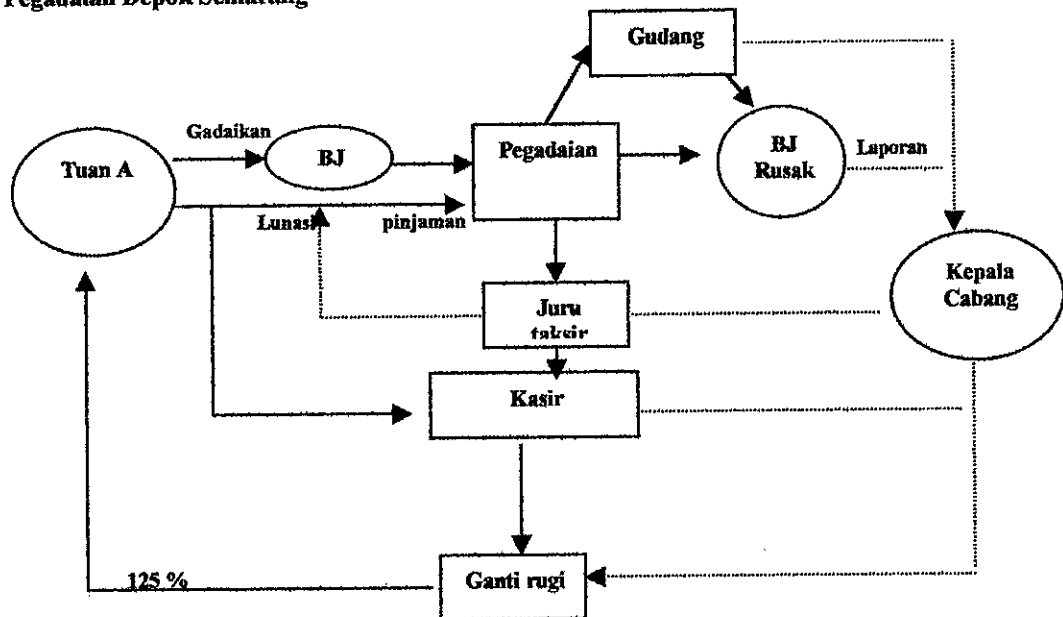
Jika satu barang jaminan sebagian rusak atau hilang maka barang itu harus ditaksir lagi oleh Kepala Cabang, dengan demikian dapat ditetapkan bagian mana yang rusak atau hilang itu. Atas bagian yang ditetapkan dengan cara demikian itu harus dibayarkan uang ganti rugi penuh.²⁴

²³ Warta Pegadaian No. 96 Tahun XIII 1999, halaman 11

²⁴ Eddy Warnoto, Wawancara, Kepala PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang (Semarang, 12 April 2004)

Gambar. 7 Prosedur penyelesaian kasus jika barang jaminan rusak di PERUM

Pegadaian Depok Semarang



Sumber data : PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang tahun 2004

Adapun pelaksanaan pembayaran ganti rugi mengacu kepada ketentuan yang telah baku yaitu Pasal 13 ayat (2) dan (3) Aturan Dasar Pegadaian Nomor 81 Tahun 1928, yang berbunyi :

1. Pemerintah bertanggung jawab atas segala kerusakan barang gadai akibat terbakar atau sebab lain yang dapat dijaga.
2. Uang ganti rugi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk barang yang hilang / rusak sama sekali, atau barang tersebut tidak bisa dipakai sama sekali, uang

ganti ruginya sebesar nilainya ditambah 25 % (atau 125 % nilai saat digadaikan).

- b. Jika sebagian dari barang gadai hilang / rusak / tidak dapat dipakai lagi, uang ganti rugi sebesar nilainya dari bagian yang rusak ditambah 25 % (atau 125 % dari selisih nilai lama dengan nilai setelah rusak).

Lebih lanjut beliau mencontohkan; nilai taksir suatu barang jaminan semula Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), uang pinjaman yang diterima nasabah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka jika terjadi kehilangan / kerusakan total, uang ganti ruginya adalah $125 \% \times \text{Rp. } 140.000,- = \text{Rp. } 175.000,-$ (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan jika hilang atau rusaknya hanya sebagian, maka barang jaminan tersebut harus ditaksir ulang sehingga dapat diketahui besarnya harga bagian yang hilang / rusak itu. Misalnya taksiran ulang terhadap barang jaminan tadi adalah Rp. 105.000, ini adalah $\frac{3}{4}$ dari nilai taksiran awal. Berarti $\frac{1}{4}$ bagian (seharga Rp. 35.000,-) barang jaminan tadi hilang / rusak, maka uang ganti ruginya adalah $\text{Rp. } 35.000 + 25 \% (\text{Rp. } 35.000) = 125 \% \times \text{Rp. } 35.000,- = (\frac{1}{4} \times 140.000,-) = \text{Rp. } 43.750,-$. Dalam hal ini nasabah akan menerima barang jaminan yang rusak itu ditambah uang ganti rugi tadi. Namun apabila nasabah tidak mau menerima barang jaminan yang telah rusak itu maka ia dapat meminta uang ganti rugi penuh ($125 \% \times \text{Rp. } 140.000,-$) dengan catatan bahwa uang ganti rugi tersebut diberikan setelah nasabah melaksanakan kewajiban melunasi hutangnya + uang sewa modal dan lain – lain.

Bagiyo berpendapat apabila barang jaminan rusak, maka pihak pemberi gadai atau nasabah berhak untuk mengajukan penuntutan ganti kerugian terhadap segala kerugian akibat rusak / hilangnya barang jaminan gadai tersebut kepada pihak PERUM Pegadaian. Hal ini seperti dalam pasal 1157 KUH Perdata ayat 1 yang menyatakan bahwa si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya.²³

Menurut Rudy Susanto, SH dalam kasus ini pemberian ganti kerugian oleh pihak PERUM Pegadaian terhadap barang jaminan gadai yang rusak atau hilang akibat kelalaiannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PERUM Pegadaian, nasabah dapat mengajukan penuntutan kerugian terhadap rusaknya / hilangnya barang jaminan gadai miliknya kepada pihak PERUM Pegadaian.²⁴

Sebagaimana dideskripsikan uraian di atas bahwa jika terjadi kerusakan / kehilangan barang jaminan baik sebagian maupun keseluruhan, maka ganti rugi diberikan sesuai dengan Aturan Dasar Pegadaian Nomor 81 Tahun 1928 Pasal 13 ayat 3. Namun masalah baru muncul ketika pihak nasabah tidak menyepakati ganti rugi tersebut.

Dari para nasabah yang menjadi responden, terungkap beberapa alasan yang menyebabkan mereka tidak menyepakati aturan ganti rugi tersebut yaitu :

²³ Bagiyo, Wawancara, Nasabah PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang, (Semarang, 15 April 2004)

²⁴ Rudy Susanto, Wawancara, Nasabah PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang (Semarang, 15 April 2004)

- a. Harga taksir ulang tidak seimbang dengan kerusakan / kehilangan.
- b. Harga pasar melonjak jauh dari harga taksir awal.
- c. Sulit mencari barang / bagian yang hilang / rusak dan
- d. Perlu waktu / tenaga ekstra untuk mencari pengganti / memperbaiki bagian yang rusak / hilang.

Ketika ditanyakan bagaimana solusi terbaik dari masalah ini, Kepala PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang menjelaskan bahwa aturan itu disusun untuk dilaksanakan, maka jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan, pelaksanaan ganti ruginya sudah diatur oleh Aturan Dasar Pegadaian Nomor 81 Tahun 1928 Pasal 13 ayat 3, ini harus dilaksanakan.²⁵ Namun jika nasabah tidak sepakat dengan aturan ini, maka masalah ini harus diajukan kepada Bupati sehingga berapa besar ganti ruginya ditentukan oleh Bupati. Hal ini sesuai dengan Aturan Dasar Pegadaian Nomor 81 Tahun 1928 Pasal 13 ayat 4 yang berbunyi :

“ apabila penebus merasa bahwa ganti rugi tersebut tidak cukup, bisa minta agar hal tersebut diputuskan oleh Bupati. Bupati akan memberikan keputusan tentang ganti rugi ini. “

Sementara itu Santoso H. Sutrisno sepakat dengan Kepala Cabang bahwa jika tidak terjadi kesepakatan, sebaiknya diputuskan

²⁵ Eddy Warnoto, Wawancara, Kepala PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang (Semarang, 12 April 2004)

oleh pengadilan.²⁶ Lebih jauh Aswandi, SH selaku Humas Kantor Wilayah VI PERUM Pegadaian Semarang menjelaskan bahwa ketika seseorang (nasabah) menandatangani Surat Bukti Kredit dari Pegadaian, maka ketika itu pula ia membuat kesepakatan dengan pihak pegadaian. Kesepakatan yang terjadi (melekat akibat penandatanganan) itu tidak hanya akan ia terima dan berapa / kapan pelunasan kreditnya, tetapi juga terhadap segala aturan baku (yuridis fomal) Pegadaian, termasuk ayat 3 Pasal 13 Aturan Dasar Pegadaian No. 81 Tahun 1928 tentang besarnya ganti rugi. Jadi suka atau tidak, senang atau tidak aturan tersebut harus disepakati dan dilaksanakan, Karena itu merupakan konsekuensi dari kesepakatan pertama dan di dalam praktek belum pernah terjadi penyelesaian kesepakatan ganti rugi diputuskan melalui putusan pengadilan.²⁷

Di lain pihak para nasabah tetap pada posisinya sebagai “ penggugat “ sehingga mereka menyampaikan pendapatnya bahwa solusi dari kasus ini adalah pihak Pegadaian harus memberikan ganti rugi materiil yang lebih besar dari 125 % nilai kerusakan sebab nasabah pasti mengalami kerugian moril (waktu, tenaga, pikiran) yang sulit untuk dinilai dengan harga materiil, atau barangkali menurut mereka (para nasabah) solusi terbaik adalah pihak pegadaian langsung mencari / mengganti / memperbaiki kerusakan dengan barang yang sama persis atau sebanding jadi tidak diganti dalam bentuk uang.

²⁶ Santoso H. Sutrisno, Wawancara, Nasabah PERUM Pegadaian Cabang Depok Semarang (Semarang, 12 April 2004)

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis menguraikan Peranan Perum Pegadaian dalam masyarakat dan permasalahannya, yang dalam hal ini Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian sebagai lembaga resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk memberikan kredit secara hukum gadai, yang ternyata keberadaannya sekarang secara hukum gadai, yang ternyata keberadaannya sekarang ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat dari golongan ekonomi lemah, maka penulis akan menarik beberapa kesimpulan dan saran sehubungan dengan masalah tersebut di atas.

A. Kesimpulan

1. Peranan PERUM Pegadaian sebagai lembaga perkreditan dalam praktek adalah untuk menyalurkan kredit untuk kebutuhan konsumtif dan produktif, terutama ditujukan untuk membantu masyarakat golongan ekonomi lemah dari jeratan para rentenir. Batasan gadai menurut PERUM Pegadaian adalah memberikan kredit berupa uang dengan dasar jaminan barang bergerak dalam jangka waktu tertentu. Pegadaian mengenal cara untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman/ kredit yaitu dengan apa

²⁷ Aswandi, Wawancara, Humas Kantor Wilayah VI PERUM Pegadaian Semarang, (Semarang 13 April 2004)

yang dikenal dengan nama gadai ulang. Apabila debitur tidak menebus barangnya (wanprestasi) maka barang akan dilelang oleh pegadaian. Jika dalam lelang ada uang kelebihan maka uang kelebihan ini dapat segera dibayarkan sesudah barangnya dilelang dan pembayaran uang kelebihan ini harus diselesaikan dengan perantaraan Kepala Cabang dengan disertai Surat Bukti Kredit (SBK).

2. Masalah yang timbul dalam praktek pelaksanaan gadai di pegadaian adalah bahwa kadang ada debitur yang sebenarnya tidak berwenang atas barang jaminan, dimana barang jaminan / barang gadai tersebut diperoleh dengan jalan yang tidak sah menurut hukum. Dalam hal ini kreditur akan tetap memperoleh hak gadai. Jika barang jaminan gadai itu merupakan pinjaman dari orang lain maka orang yang bersangkutan dapat meminta surat persetujuan gadai dari si pemilik barang atau si pemilik barang menguasai barang miliknya untuk digadaikan.
3. Pemberian ganti rugi oleh pihak PERUM pegadaian terhadap barang jaminan gadai yang rusak / hilang akibat kelalaiannya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 1157 ayat (1) dimana disebutkan si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotannya barang gadai, sekadar itu telah terjadi karena kelalaiannya.

B. Saran – Saran

1. Hendaknya PERUM Pegadaian lebih gencar lagi mengadakan publikasi kepada masyarakat luas agar masyarakat tertarik dan lebih mengenal pegadaian dengan semboyannya, yaitu : Mudah, Cepat, Aman dan Manusiawi.
2. Hendaknya Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah lebih memperhatikan keberadaan cabang – cabang pegadaian di daerahnya, demi kelangsungan pegadaian tersebut di masa – masa yang akan datang
3. Pihak Pegadaian di dalam menerima barang gadai hendaknya menanyakan identitas calon nasabah beserta surat – surat bukti kepemilikan termasuk barang gadai yang menyertakan BPKB maupun STNK untuk mempertegas bukti kepemilikan. Hal ini penting bagi pegadaian untuk bersikap hati – hati di dalam menerima barang jaminan dari calon nasabah, sebab apabila di kemudian hari terdapat permasalahan mengenai barang jaminan dari hasil kejahatan maka pihak pegadaian yang akan dirugikan.
4. Untuk lebih menarik lagi masyarakat pencari kredit pada umumnya, hendaknya suku bunga PERUM Pegadaian dapat ditinjau kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murtati, Segi Hukum Lembaga Pembiayaan dan Keuangan, Citra Aditya Bakti, (Bandung 2000).
- Djarwanto, P.S. Pokok – Pokok Metode Riset dan Bimbingan Tehnis Penulisan Tesis, (Yogyakarta, Liberty 1984).
- Elise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin, Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara – Perkara Perdata, (Jakarta : Bina Kasara, 1987).
- Ignatius Ridwan Widyadharma, Sedikit Tentang Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta, PT. Tanjung Mas, 1982).
- Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, (Bandung Alumni. 1983)
- Marhainis Abdul Hay, Hukum Perdata Material Jilid II, (Jakarta, Perdnya Paramitan. 1983).
- Mariam Darus Badruzaman, Tentang Creditverband, Gadai Dan Fiducia, (Alumni Bandung, 1978).
- P.J Soepraktiknja, Pokok – Pokok Hukum Perdata Benda Jilid 1, (Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1982).
-, Pokok – Pokok Hukum Perdata Benda Jilid 2, (Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1983).
- Purwahid Patrik , Hukum Benda, (Fakultas Hukum Undip Semarang, 1998).
- Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT, (Fakultas Hukum Undip Semarang, 2002).

- Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata, (Alumni Bandung, 1985).
- R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda, (Jakarta Intermasa 1981).
- Ronny Hanitijo Soemitro, “ Penelitian Hukum Normatif “, Masalah – Masalah Hukum (Jakarta, 1988)
-, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, (Jakarta, Ghalia Indonesia 1990).
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung Alumni Cetakan Pertama 1982).
- Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta Press tahun 1986).
- S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Tarsito, Bandung 1988).
- Soenarso. R, Sejarah Pegadaian, (Jakarta : Bina Kasara, 1971).
- Soetrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I (Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajahmada 1984).
-, Metodologi Research Jilid II (Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajahmada 1985).
- Sri Redjeki Hartono, Bentuk – Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Usaha, (Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 1999).
- Sri Soedewi M. S, Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok – Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, (BPHN, 1980).
- Subekti. R, Jaminan – Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, (Alumni, Bandung, 1982).

....., **Pokok – Pokok Hukum Perdata**, (Penerbit PT. Intermasa, Jakarta tahun 1983).

Vollmar H. F.A, **Pengantar Hukum Perdata**, (Penerbit C.V. Rajawali, Jakarta 1986).

....., **Hukum Benda**, disadur oleh Chidir Ali, (Penerbit Tarsito Bandung 1980).

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan BentukPerusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 1993 Tentang Pengalihan BentukPerusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Perjan Pegadaian, Buku Tata Cara Menaksir, (Jakarta Departemen Keuangan RI, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, 1981).

Reglement Pegadaian Nomor 11.

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI, No. KEP. 39 / MK/6/I/1971
Bab II